

≡ NOTULEN ≡

1. Acara : RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASASIDANG II TAHUN 2019 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2. Hari/Tanggal : 22 JULI 2019
3. Jam : 09.00 – 16.30.Wib.
4. Tempat : RUANG RAPAT UTAMA DPRK ACEH TENGGARA
5. Pimpinan Rapat : KETUA DPRK ACEH TENGGARA (IRWANDI DESKY, SP)
6. Sekretaris : SEKRETARIS DPRK ACEH TENGGARA (MUHAMMAD)
7. Notulen : MUHADI DAN WAHYU HIDAYAT
8. Anggota DPRK Yang Hadir Sesuai Undangan :

1. IRWANDI DESKY, SP	13. ARNOLD
2. JAMUDIN SELIAN	14. T. DEDY FAISAL, ST
3. NAZARUDDIN	15. RAIDIN
4. Ir. BUDIMANSYAH	16. SAHUDIN
5. BARUDIN	17. TAKDIR EDY WINTA, ST
6. USMAN EFENDI	18. Drs.H.MUHAMMAD YAMIN SAIPI
7. GABE MARTUA TAMBUNAN	19. BUSTAMI ACEH
8. H.M.SOPIAN DESKY, S.Ag	20. SOFYAN EFENDI
9. NURLELAWATI	21. KAMIRUN MUNTHE
10. HAFRI GUNAWAN	22. SUPIAN
11. JOHANUDDIN DESKY	23. FELIX SUBRIYANTO
12. MUHAMMAD DAUD	24. JEMINAH
9. Izin/Sesuai dengan Undangan :
 1. HJ. SAMSIAR, SE
 2. HASANUSI
 3. TIMBUL HASUDUNGAN SAMOSIR
 4. INDIRA HAYATI
 5. HJ. HELENA
 6. SUPIAN
10. Turut Hadir : BUPATI, WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA, UNSUR FORKOPIMDA, SEKDAKAB, PARA ASISTEN, DINAS JAWATAN, KABAG DAN PARA UNDANGAN LAINNYA DAFTAR HADIR TERLAMPIR

- P E M B U K A A N -

1. LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA OLEH SEKRETARIS DPRK, DARI 30(TIGA PULUH) ORANG ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA YANG HADIR 26 (DUA PULUH ENAM) ORANG, IZIN 4 (EMPAT) ORANG SESUAI DENGAN TATA TERTIB MAKA JUMLAH YANG HADIR TELAH MEMENUHI QUORUM UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA (DAFTAR HADIR TERLAMPIR)-----
2. PEMBACAAN KITAB SUCI AL-QUR'AN YANG DIBACAKAN OLEH Sdr. (SAHRUDIN PINEM). -----
3. MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA YANG DIPANDU OLEH PETUGAS -----
4. PIDATO SAMBUTAN PEMBUKAAN RAPAT OLEH KETUA DPRK ACEH TENGGARA (Irwandi Desky, SP) :

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

 - YTH. SAUDARA BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA DANDIM 0108 ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA KAPOLRES ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE.
 - YTH. SAUDARA KETUA MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE.
 - YTH. SAUDARA KETUA MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA.
 - YTH. SAUDARA SEKDAKAB, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.
 - YTH. PIMPINAN LEMBAGA FORMAL DAN NON FORMAL, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH POLITIK, TOKOH PEMUDA, ORMAS, UNSUR LSM DAN INSAN PERS.
 - YTH. HADIRIN HADIRAT PARA UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN



PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MAHA BIJAKSANA. KARENA DENGAN LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK DAPAT HADIR DI GEDUNG DEWAN YANG TERHORMAT INI DALAM RANGKA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG II TAHUN 2018, TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SELAWAT BERIRING SALAM, TIDAK LUPA PULA KITA SANJUNGAN KEHARIBAAN JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN SAHABAT-SAHABAT BELIAU, YANG TELAH BERHASIL MEMBAWA MEREFORMASI MANUSIA DARI KEGELAPAN PERADABAN MENUJU CERAHNYA TATANAN DUNIA BARU YANG BERNAPASKAN IMAN DAN ISLAM.

UCAPAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEGENAP HADIRIN YANG TELAH BERKENAN HADIR MEMENUHI UNDANGAN KAMI UNTUK MENGIKUTI PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA YANG SANGAT PENTING INI.

SAUDARA BUPATI YANG KAMI HORMATI
HADIRIN HADIRAT YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA SAUDARA BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA DPRK ACEH TENGGARA, BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA OLEH BPK-RI. LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT MELIPUTI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017, NERACA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 71 TAHUN 2010, TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PERATURAN MENDAGRI NOMOR : 64 TAHUN 2013, TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH, YANG MULAI DIBERLAKUKAN SEJAK TAHUN ANGGARAN 2015.

SAUDARA-BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK-RI, TELAH DISAMPAIKAN KEPADA DPRK ACEH TENGGARA, MELALUI SURAT PENGANTAR BPK-RI PERWAKILAN ACEH, NOMOR : 513/S/XVIII.BAC/07/2018, TANGGAL 2 JULI 2018, PERIHAL HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, YANG MELIPUTI LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017, LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM LHP BPK-RI TERSEBUT, DISEBUTKAN BAHWA OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, ADALAH " WTP " ATAU WAJAR TANPA PENGECUALIAN (UNQUALIFIED OPINION). LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 INI, SAMA DENGAN LHP BPK-RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2015, YANG BERARTI PULA, BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TELAH DUA KALI MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK-RI.

DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA LHP BPK-RI TERSEBUT, MATERI YANG KITA YANG KITA BAHAS TELAH TERSEDIA. ANGGOTA-ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA, BAIK SECARA PERORANGAN MAUPUN LEWAT ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRK, TELAH MEMBACA, MEMPELAJARI, MENCERMATI DAN MERESUME SETIAP PERSOALAN YANG DITEMUKAN PADA DOKUMEN LHP BPK-RI DAN FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BERKAITAN DENGAN PERHITUNGAN APBK TAHUN 2017. KARENA ITU, DALAM PEMBAHASAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF NANTINYA AGAR DAPAT DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN DITEMUKAN SOLUSI YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SAUDARA SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DARI TANGGAL 30 S/D 31 JULI 2018, TELAH DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG II TAHUN 2018, TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017. PADA SAAT YANG BERSAMAAN, DPRK ACEH TENGGARA TELAH MELAKSANAKAN SALAH SATU TUGAS POKOK YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRK DALAM MENYERAP ASPIRASI YANG BERKEMBANG DI LAPANGAN. KEGIATAN TERSEBUT DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KUNJUNGAN KERJA (KUNKER), YANG DIBAGI DALAM GUGUS TUGAS MASING-MASING SECARA BERKELOMPOK SESUAI DENGAN JUMLAH KOMISI YANG ADA DI DPRK ACEH TENGGARA.

TIM KUNKER TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN BAIK. BANYAK INFORMASI DAN TEMUAN YANG DIPEROLEH DARI KUNJUNGAN KE SKPK-SKPK, YANG MERUPAKAN MITRA STRATEGIS DPRK ACEH TENGGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. HASIL TEMUAN DALAM KUNKER INI DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI BESERTA SEGENAP JAJARANNYA AGAR DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN HASIL AUDIT YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH BPK-RI. KARENA ITU, BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017, YANG MENJADI TITIK FOKUS ADALAH, BAGAIMANA TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN FAKTA BERDASARKAN LHP BPK-RI TERSEBUT.

PERLU DIPAHAMI, BAHWA PRINSIP DASAR LAPORAN KEUANGAN DAERAH, ADALAH, BAGAIMANA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. DI SISI LAIN, PRINSIP DARI AUDIT BERDASARKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN, ADALAH KEPANTASAN DAN KEWAJARAN. DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DARI SETIAP SATUAN ANGGARAN YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMBIYAI SUATU KEGIATAN, HARUS JELAS PENGGUNAANNYA. DEMIKIAN JUGA PELAKSANAAN SETIAP KEGIATAN HARUS JELAS UKURAN PENCAPAIANNYA.

SAUDARA SEKALIAN YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN



UNTUK MENINGATKAN KITA, BAHWA HAKIKAT DARI AUDIT YANG DILAKUKAN BPK ADALAH AUDIT YANG DILAKUKAN DPRK ITU SENDIRI. DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAHWA ANTARA BPK DAN DPRK TERDAPAT KERJASAMA DALAM BIDANG AUDIT ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN. KARENA ITU, LHP DISAMPAIKAN SECARA RESMI OLEH BPK KEPADA DPRK.

SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG KAMI HORMATI
REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI BANGGAKAN

PADA BAGIAN LAIN ACARA INI, SETELAH SELESAINYA ACARA PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA INI, KAMI PERSILAKAN KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN NOTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2017.

SECARA KHUSUS, KAMI JUGA MEMINTA KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRK, BAIK PERORANGAN MAUPUN YANG TERGABUNG DALAM KOMISI-KOMISI DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN LAINNYA, AGAR SECARA SERIUS MEMPELAJARI DAN MENCERMATI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 INI. SELAKU PIMPINAN DEWAN, KAMI SANGAT BERHARAP, SAUDARA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN AGAR BEKERJA SECARA MAKSIMAL DAN PENUH TANGGUNG JAWAB. KESERIOUSAN SAUDARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KAMI BERIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA, KARENA HAL TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN MORAL DAN POLITIK KEPADA SELURUH RAKYAT ACEH TENGGARA YANG KITA WAKILI. PERLU DIPAHAMI, BAHWA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, JANGANLAH DIARTIKAN HANYA SEBAGAI PENETAPAN ATAS BESARAN ANGKA-ANGKA SEMATA, TAPI JUGA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH INI YANG NANTINYA AKAN DISEPAKATI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAN DPRK ACEH TENGGARA.

MARILAH SAMA-SAMA KITA BERUPAYA, AGAR RANGKAIAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DAPAT MENGHASILKAN KEPUTUSAN YANG TERBAIK, DIMANA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DALAM PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DPRK ACEH TENGGARA DAN DITETAPKAN MENJADI QANUN ACEH TENGGARA.

HADIRIN TAMU UNDANGAN KAMI
SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

DEMIKIAN SAMBUTAN KAMI DALAM RANGKA PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA, MASA SIDANG II TAHUN 2018, TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017.

AKHIRUL QALAM, KEPADA ALLAH YANG MAHA KUASA KITA BERSERAH DIRI DAN MOHON AMPUNAN. SEMOGA KEGIATAN YANG KITA LAKSANAKAN INI MENDAPAT BERKAH DAN RIDHONYA. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

WABILLAH TAUFIQ WALHIDAYAH
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

KUTACANE, 1 AGUSTUS 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KETUA,

Dto

IRWANDI DESKY, SP -----

5. PIDATO SAMBUTAN BUPATI ACEH TENGGARA YANG DIBACAKAN OLEH BUPATI ACEH TENGGARA (Drs. RAIDN PINiM, M.AP)

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABRAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN!

- YTH.KETUA DPRK ACEH TENGGARA
- YTH. PARA UNSUR FORKOMPIMDA ACEH TENGGARA;
- YTH. PARA WAKIL KETUA, PARA KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK;
- YTH.SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, STAF AHLI;
- YTH. SDR. PARA KEPALA OPD (SKPK), PARA KABAG. DAN CAMAT;
- YTH. SDR-SDR. DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;
- YTH. TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI DAN SYUKUR MARI KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA SEMUA DAPAT BERKUMPUL DALAM RUANGAN SIDANG YANG TERHORMAT INI UNTUK MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN SIDANG PARIPURNA DPRK MASA SIDANG II (KE-DUA) TAHUN 2018 DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017.

SELANJUTNYA YANG SEAQIDAH DENGAN SAYA, MARI KITA UCAPKAN SHOLAWAT BERIRING SALAM KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN PENGIKUTNYA.



DI TEMPAT YANG TERHORMAT INI, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG TELAH BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN KEPADA SAYA UNTUK MENYAMPAIKAN KATA SAMBUTAN DALAM RANGKA PEMBUKAAN MASA SIDANG II(KE-DUA) DPRK ACEH TENGGARA TAHUN 2018 UNTUK MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 INI TELAH MENERAPKAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 10 AYAT (2) YANG MENYATAKAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH PALING LAMBAT MULAI TAHUN ANGGARAN 2015. STANDAR TERSEBUT MENGAKUI PENGARUH TRANSAKSI DAN PERISTIWA LAINNYA PADA SAAT TRANSAKSI DAN PERISTIWA ITU TERJADI TANPA MEMPERHATIKAN SAAT KAS ATAU SETARA KAS DITERIMA ATAU DIBAYAR. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 DILAKUKAN MULAI DARI KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (GAVERMENTAL ACCOUNTING), PROSES REKONSILIASI SELURUH DATA KEUANGAN SKPK, CAPAIAN TARGET KINERJA SELURUH SKPK, PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI DAN KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPK. UNTUK MENCAPI SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK, PERAN APIC (APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH) SANGAT MENENTUKAN, UNTUK ITU APIC HARUS MAMPU MENINGKATKAN KINERJANYA, MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN APBK TAHUN BERIKUTNYA. RINGKASAN REALISASI ANGGARAN DAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM BENTUK BUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SERTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN DENGAN NOMOR : KU.900/321/2018 TANGGAL 16 JULI 2018, UNTUK MENDAPAT PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DARI ANGGOTA DEWAN TERHORMAT.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH YAITU PADA TANGGAL 11 MEI 2018 DAN SELANJUTNYA TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH DENGAN 2 (DUA) TAHAP YAITU PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (ANAUDITED) DILAKUKAN PADA TANGGAL 11 MARET S.D 30 MARET 2018 BERDASARKAN SURAT TUGAS NOMOR 80/ST/XVIII.BAC/03/2018 TANGGAL 06 MARET 2018 DAN DILANJUTKAN DENGAN PEMERIKSAAN TERINCI (AUDITED) SEJAK TANGGAL 15 MEI S.D 08 JUNI 2018 SESUAI SURAT TUGAS NOMOR 164/ST/XVIII.BAC/05/2018 TANGGAL 14 MEI 2018 DAN HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT TELAH KITA TERIMA PADA TANGGAL 02 JULI 2018 YANG LALU.

DARI HASIL AUDIT TERSEBUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017. PEMERINTAH DAERAH SANGAT BERKEPENTINGAN DENGAN HASIL AUDIT TERSEBUT KARENA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI KEMENTERIAN KEUANGAN MENERAPKAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT (HADIAH DAN HUKUMAN) TERHADAP PEMERINTAH DAERAH. TERDAPAT TIGA MACAM KRITERIA DALAM SISTEM TERSEBUT YAITU DAERAH TELAH MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN BAIK, DAERAH MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TEPAT WAKTU DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK-RI. APABILA PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKAN KETIGA KRITERIA TERSEBUT DENGAN BAIK MAKA AKAN MEMPEROLEH INSentif TAMBAHAN. NAMUN APABILA PEMERINTAH DAERAH TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN KRITERIA-KRITERIA TERSEBUT DENGAN BAIK AKAN BERUJUNG PADA PEMBERIAN SANKSI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN TERUTAMA SANKSI YANG BERSIFAT KEUANGAN. UNTUK ITU KEDEPAN SAYA INGATKAN SELURUH KEPALA SKPK AGAR BERUPAYA TERUS UNTUK MENDORONG DAN MENINGKATKAN KINERJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, SEHINGGA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH DAPAT KITA PEROLEH LAGI PADA TAHUN MENDATANG.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN INDIKATOR BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DAN PERBAIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KEDEPAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk Masyarakat.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA PENJELASAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, AKAN DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PLENO BERIKUTNYA MELALUI PENGANTAR NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK YANG TELAH DIURAIKAN SECARA RINCI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, MUDAH-MUDAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 YANG TELAH DISAMPAIKAN MENJADI PERHATIAN DARI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK DAPAT DITETAPKAN MENJADI QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.



SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIANLAH KATA SAMBUTAN INI SAYA SAMPAIKAN, MUDAH-MUDAHAN RAPAT PLENO SELANJUTNYA BERJALAN LANCAR DAN BAIK. SAYA INGATKAN KEPADA SELURUH KEPALA SKPK AGAR MENGIKUTI SEMUA AGENDA PERSIDANGAN INI DAN MENGAMBIL MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

AKHIRNYA KEPADA TUHAN KITA BERSERAH DIRI DAN SERAYA MEMOHON TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA. AMIN YARABIL ALAMIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS KEKURANGAN.

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

KUTACANE, 01 AGUSTUS 2018
BUPATI ACEH TENGGARA,

Dto,

Drs. RAIDIN PINIM, M.AP -----

6. PEMBACAAN DO'A YANG DISAMPAIKAN OLEH (IRWANHADI, M.Pd.I -----

I Pembicaraan Tingkat I

- A. DENGAN MENGUCAP ----BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM----- RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA – MASA SIDANG II TAHUN 2018 – TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 ----- DENGAN INI DI BUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM --- -----PALU 1X-----
- B. PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA (IRWANDI DESKY, SP) MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA “APAKAH TERTIB ACARA YANG KITA SUSUN PADA RAPAT BADAN MUSYAWARAH BEBERAPA WAKTU LALU DAPAT KITA SETUJUI ” ANGGOTA DPRK-PUN MENYATAKAN “SETUJU” MAKA PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MENGETUK PALU 1 X BAHWA TERTIB ACARA TELAH DISETUJUI -----
- C. PENYAMPAIAN NOTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA (Drs. RAIDIN PINIM, M.AP)

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABRAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN!

- YTH.KETUA DPRK ACEH TENGGARA
- YTH. PARA UNSUR FORKOMPIMDA ACEH TENGGARA;
- YTH. PARA WAKIL KETUA, PARA KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK;
- YTH.SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, STAF AHLI;
- YTH. SDR. PARA KEPALA OPD (SKPK), PARA KABAG. DAN CAMAT;
- YTH. SDR-SDR. DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;
- YTH. TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA. PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;

ALHAMDULILLAHIRABBIL'ALAMIN, PERTAMA-TAMA IZINKANLAH SAYA MENGAJAK BAPAK DAN IBU SEKALIAN UNTUK BERSAMA-SAMA MEMPERSEMBAHKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN IZIN-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA SIDANG PARIPURNA DPR KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA MARILAH BERSAMA-SAMA KITA UCAPKAN SHALAWAT BERIRING SALAM KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBAWA PERUBAHAN POLA HIDUP UMAT MANUSIA SEPerti YANG KITA ALAMI SAAT SEKARANG INI.

PADA KESEMPATAN INI, IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG BAIK TERHADAP PEMERINTAH DAERAH, SINERGISITAS PERLU TERUS DILAKUKAN SEHINGGA TERLAKSANA TUGAS DAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN DENGAN TUJUAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAPAT TERCAPAI. PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2017 MERUPAKAN RANGKAIAN DAN LANJUTAN DARI PROGRAM-PROGRAM TAHUN SEBELUMNYA DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI, SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA,



MAKSUD DISUSUNNYA NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 INI UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN MENGENAI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM PROSES PENCAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SERTA TEMA PEMBANGUNAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017.

DALAM NOTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK INI DISAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG TERDIRI DARI :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN;
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH;
3. NERACA;
4. LAPORAN OPERASIONAL;
5. LAPORAN ARUS KAS;
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN DISAMPAIKANNYA NOTA PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017 INI, KAMI BERHARAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DAPAT MEMBERIKAN PANDANGAN DAN MASUKAN GUNA MEMPERBAIKI SERTA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

PEMERINTAH DAERAH TELAH BERUPAYA MEMAKSIMALKAN PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH SERTA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SALAH SATU INDIKATOR KEBERHASILAN DARI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADALAH DENGAN TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA UMUM YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN KEGIATAN PEREKONOMIAN, SEPERTI SARANA DAN PRASARANA JALAN, PASAR DAN IRIGASI SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT MENJALANKAN KEGIATAN EKONOMINYA SECARA EFEKTIF DAN EFESIEN.

SELANJUTNYA, UNTUK Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur, serta terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik, harus dilaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, sehingga memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menjawab dinamika zaman secara profesional. Zaman sudah berubah mulai generasi melineal sampai ke Z (ZET) atau yang populer disebut " Kids Zaman Now " semua serba internet. Kalau sekarang anak baru lahir sudah bisa main gadget, layar sentuh dan lain-lain. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah berubah mulai dari e-planing sampai e-reporting, semua menggunakan internet. Sayangnya dalam generasi ini kita terlalu eksfresif dan mudah mengungkapkan opini yang tidak bertanggungjawab melalui beragam media khususnya media sosial.

SAUDARA PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017, YANG TELAH DITETAPKAN, MAKA UNTUK LEBIH RINCINYA AKAN KAMI URAIKAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM BENTUK REALISASI PENJABARAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 YANG MELIPUTI :

A. REALISASI PENDAPATAN DAERAH.

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.1.499.642.353.338,00,- DENGAN UPAYA YANG DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MAKA SECARA KESELURUHAN DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp.1.404.037.363.923,69,- ATAU 93,62%.

DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.115.755.171.495,00,- DENGAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN HANYA DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp.60.053.234.222,18,- ATAU 51,88%, TIDAK TEREALISASINYA SECARA PENUH TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, HAL INI DISEBABKAN MASIH RENDAHNYA REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERUTAMA DARI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).
2. BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN TRANSFER DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.1.383.887.181.843,00,- DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp.1.343.984.129.701,51,- ATAU 97,12%.

B. REALISASI BELANJA

PADA TAHUN ANGGARAN 2017, ANGGARAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERBAGI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TAK TERDUGA DAN TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA.

DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

BELANJA DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.1.543.106.761.941,00,- DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp.1.343.790.069.489,00,- ATAU 87,08% TERBAGI ATAS :

1. BELANJA OPERASI DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.750.140.970.081,00,- TEREALISASI SEBESAR Rp.718.064.955.283,00,- ATAU 95,72%.
2. BELANJA MODAL YANG DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.434.953.467.860,00,- TEREALISASI SEBESAR Rp.364.232.905.006,00,- ATAU 83,74%.



3. BELANJA TAK TERDUGA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT/BENCANA ALAMDIRENCANAKAN SEBESAR Rp.12.238.001.000,00,- DAPAT TEREALISASI SESUAI TARGET SEBESAR Rp.12.238.001.000,00,- ATAU 100,00%.
4. BELANJA TRANSFER/BAGI KE DESA DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.345.774.323.000,00,- TEREALISASI SEBESAR Rp.249.254.208.200,00,- ATAU 72,09%.

C. REALISASI PEMBIAYAAN

REALISASI PEMBIAYAAN TERDIRI DARI REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH.

DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR Rp.43.464.408.603,00,- TEREALISASI SEBESAR Rp.33.464.408.603,12,- ATAU 76,99%. DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2017 SEBESAR Rp.93.711.703.037,81.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH PENJELASAN SECARA GARIS BESAR TENTANG NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, SELANJUTNYA PENJELASAN YANG LEBIH RINCI UNTUK MASING-MASING AKUN PENERIMAAN DAN AKUN PENGELUARAN TELAH TERCANTUM PADA KOLOM TERSENDIRI DALAM LAPORAN REALISASI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA,

SELAMA TAHUN ANGGARAN 2017 INI, KITA TELAH MEMBERIKAN BANTUAN BIBIT TERNAK, TANAMAN DAN TERUS MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR BAIK PASAR, JALAN, JEMBATAN DAN SARANA PRASARANA LAINNYA DALAM MENDUKUNG SELURUH AKTIVITAS MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMINYA SEHARI-HARI, SEMUANYA MERUPAKAN SEBUAH USAHA BERSAMA DARI SEMUA PIHAK. PADA MASA MENDATANG KITA DITUNTUT UNTUK BERBUAT YANG LEBIH BAIK LAGI, SERTA LEBIH BERKEMAMPUAN PULA DALAM MEMENUHI APA YANG MENJADI ASPIRASI, HARAPAN DAN DAMBAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA MASUKAN, SARAN DAN KOREKSI YANG TELAH DISAMPAIKAN SELAMA INI. MASUKAN, SARAN DAN KOREKSI DALAM NOTA PENGANTAR INI AKAN MENJADI PEDOMAN BAGI KAMI DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN KEDEPAN.

AKHIRNYA KEPADA ALLAH SWT KITA BERMohon AMPUNAN, SEMOGA KITA SENANTIASA MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN PETUNJUK YANG BENAR DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN. AMIN.

WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

KUTACANE, 01 AGUSTUS 2018
BUPATI ACEH TENGGARA,

Dto,

Drs. RAIDIN PINIM, M.AP-----

D. PENYAMPAIAN PANDANG UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.
PADA KESEMPATAN PERTAMA INI KAMI PERSILAHKAN KEPADA FRAKSI YAITU :

1. FRAKSI GOLKAR

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT, PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIAINI MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEAHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA YANG SENANTIASA MEMBERI KITA LIMPAPAN NIKMAT DAN KURUNIANYA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE II TAHUN 2018, TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN PARA HADIRIN RAPAT PARI PURNA YANG KAMI HORMATI

BERKENAAN DENGAN AWAL MASA KEPEMIMPINAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017-2022 KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAS



DI RAIHNYAPRESTASIDARI BPK-RI HINGGA ACEH TENGGARA MEMPEROLEH PERIDIKAT WAJAR TANPAPENGECUALIAN (WTP), MUDAH-MUDAHAN SUATU AWAL YANG BAIK ATAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAJUAN DERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA, ATAS PEROLEHAN WTP TERSEBUT KAMI DARI FRAKSI GOLKAR BERHARAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAPAT MEMPERTAHANKAN PERESTASI TERSEBUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA,

BERDASARKAN LAPORAN BPK-RI TENTUNYA KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMANDANG BAHWA LAPORAN TERSEBUT SANGAT PENTING UNTUK MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA, DALAM MEMPERTAHANKAN PERESTASI YANG TELAH DIRAIH, HAL INI BERTUJUAN AGAR DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN LEBIH TERKONTROL DAN TERKENDALI, NAMUN TUGAS DPRK SELAKU PENGAWASAN DAPAT MENCERMATI HASIL PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH KEDEPAN, AGAR DI TINGKATKAN, SEPERTI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SEGALA KEKURANGAN, DAPAT DI PERBAIKI GUNA MENCAPAI HASIL YANG OPTIMAL DI KEMUDIAN HARI,

SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERDASARKAN PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, ADALAH MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH, DENGAN TUJUAN MAJU PESATNYA PROSES PEMBANGUNAN SECARA NASIONAL, PELAKSANAAN PEMERINTAHAN TERSEBUT TENTUNYA AKAN BERHASIL APABILA DI DUKUNG DENGAN PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DAPAT DI IMPLEMENTASIKAN SECARA TEPAT, MENDAPATKAN PARTISIPASI DARI MASYARAKAT, DI DUKUNG DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI, DI LAKSANAKAN DENGAN EFEKTIF ,EFESIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERKUALITAS.

DARI SEDERET RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI KOMITMEN KITA BERSAMA SEBAGAI PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH YAITU, EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, GUNA MEWUJUDKAN SELURUH KEINGINAN KITA BERSAMA, TENTUNYA POSISI DEWAN SEBAGAI LEMBAGA LEGISLASI, BUDGETING, DAN PENGAWASAN, MENJADI HUBUNGAN YANG TIDAK DAPAT TERPISAHKAN, SEHINGGA MITRA LEMBAGA PEMERINTAHAN TERSEBUT DAPAT BERJALAN SECARA SEIRING, WAJAR DAN PROPESSIONAL.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI, DAN ANGGOTA DEWAN, RAPAT PARI PURNA YANG TERHORMAT

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SERTA UNDANG-UNDANG TERKAIT LAINNYA, TENTUNYA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN WAJAR LAPORAN KEUANGAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGENDALIAN INTERN YANG MEMADAI, DALAM MEYUSUN LAPORAN KEUANGAN YANG BEBAS DARI SALAH SAJI MATERIAL, BAIK YANG DI SEBABKAN OLEH KECURANGAN MAUPUN KESALAHAN,

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI, SERTA TAMU UNDANGAN YANG KAMI HORMATI TANGGAPAN DAN CATATAN FRAKSI GOLKAR SEMATA-MATA BUKANLAH MERUPAKAN SUATU MASALAH POLITIS, NAMUN INI SEMUA DEMI KEBAIKAN DAN KEMAJUAN KITA BERSAMA, SEHINGGA FRAKSI GOLKAR TETAP KONSISTEN UNTUK MELUANGKAN WAKTUNYA DALAM MENCERMATI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TA 2017, DI SAMPING ITU DI TENGAH TUNTUTAN ATAS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TENTUNYA DALAM PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN MENJADI PERHATIAN UTAMA BAGI KTA SEMUA, OLEH KARENA ITU, UNTUK MENILAI LAPORAN REALISASI APBK TAHUN ANGGARAN 2017 INI, BUKANLAH SEKEDAR MENILAI AKTIFITAS TEKNIS DALAM MENGHITUNG MASUKAN (INPUT) DANA, PROSES PENGELOLAAN, DAN EFEKTIVITAS MAUPUN EFISIENSI ANGGARAN SAJA, MELAINKAN JUGA UNTUK MENELAAH TINGKAT AKUNTABILITAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEMAJUAN KAPASITAS DAERAH YANG TRANSPARANSI DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, ANGGOTA DEWAN SIDANG PARI PURNA YANG TERHORMAT

UNTUK MELENGKAPI HASIL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TA 2017 KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN YANG KAMI ANGGAP PATUT MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA YAITU :

1. TERKAIT DENGAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 TENTANG PENDAPATAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBK, KAMI MENILAI ADANYA KETIDAK PROPORSIONALAN DALAM PENGANGGARAN YANG MANA PENGANGGARAN BELANJA SEBESAR RP.1.543.089.752.043,00 SEDANGKAN PENGANGGARAN PENDAPATAN SEBESAR RP.1.499.625.343.440,00 BERDASARKAN HAL TERSEBUT, KIRANYA PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL INI SAUDARA BUPATI DAPAT MENJELASKANNYA.
2. TERKAIT DENGAN PENGANGGARAN RETRIBUSI DAERAH DALAM P-APBK YANG DI TARGETKAN SEBESAR RP. 38.708.081.500,00 YANG MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR RP. 1.285.000.000.00 ATAU 3,4% DARI TARGET SEBELUMNYA SEBESAR RP.37.423.081.500 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DI KETAHUI RETRIBUSI DAERAH YANG TERCAPAI SEBESAR RP.881.390.909.00 ATAU HANYA 2,28% DARI ANGGARAN, ATAS RENDAHNYA CAPAIAN TERSEBUT KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA PENEJELASAN DARI SAUDARA BUPATI ATAS TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI TERSEBUT.
3. TERKAIT PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG TIDAK MENGACU PADA KETENTUAN DAN TIDAK MEMPERHATIKAN KEUANGAN DAERAH TERDAPAT PENYEDIAAN ANGGARAN DALAM P-APBK YANG DI LARANG UNTUK DI ANGGARKAN, KARENA DI NILAI TIDAK



BERKORELASI LANGSUNG DENGAN PENGELUARAN KEGIATAN TERKAIT, DI LIHAT DARI ASPEK INDIKATOR, TOLAK UKUR, DAN TARGET KINERJKA YANG TIDAK DI URAIKAN DALAM JENIS OBJEK DAN RINCIAN OBJEK BELANJA, KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL INI SAUDARA BUPATI AGAR TERTIB DAN BIJAK DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAH AGAR PERMASLAHAN INI TIDAK TERULANG KEMBALI DI MASA YANG AKAN DATANG

PIMPINAN SIDANG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN RAPAT PARI PURNA YANG TERHORMAT

DILIHAT DARI FUNGSI ANGGOTA DEWAN SEBAGAI KONTROL DAN PENGAWASAN YANG SELALU MENYOROTI PENYERAPAN ANGGARAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TIAP TAHUNYA TERUS MENINGKAT, KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENEKANKAN AGAR PENGGUNAAN ANGGARAN DAPAT DILAKUKAN SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU, SEKALIGUS SEBAGAI UPAYA UNTUK MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG MENCERMINKAN SUATU PRINSIP DASAR PENEGAKKAN AKUNTABILITAS PUBLIK, DALAM SEMUA TAHAPANNYA BAIK PADA SAAT PERENCANAAN, MAUPUN PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN MAUPUN TANGGUNG JAWABNYA.

OLEH KARENA ITU PRINSIP AKUNTABILITAS PUBLIK HARUS DI TERAPKAN KEPADA SELURUH LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG BEKERJA DI ATAS LEGALITAS DAN LEGITIMASI MASYARAKAT AGAR TIDAK ADANYA KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA KONSEKUENSI HUKUM.

DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR ATAS RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENINDAKLANJUTI DAN MEMBERIKAN PENJELASAN YANG LEBIH OBJEKTIF DAN ARGUMENTATIVE. SEHINGGA LAPORAN REALISASI APBK INI MEMILIKI BOBOT OBJEKTIVITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI YANG TINGGI DIHADAPAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

KUTACANE, 01 AGUSTUS 2018
FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRK
ACEH TENGGARA

1. HJ. SAMSIAR, SE	KETUA Dto
2. HASANUSI	WAKIL KETUA Dto
3. ARNOLD SH	SEKRETARIS Dto
4. HJ. HELENA	ANGGOTA Dto
5. IRWANDI DESKY,SP	ANGGOTA Dto
6. Drs. H.M. YAMIN SAIPI	ANGGOTA Dto
7. TAKDIR EDY WINTA, ST	ANGGOTA Dto
8. HAPRI GUNAWAN	ANGGOTA Dto
9. BARUDIN	ANGGOTA Dto
10. INDIRA HAYATI	ANGGOTA Dto
11. GABE MARTUA TAMBUNAN	ANGGOTA Dto
12. IR. FELIX SUBRIANTO	ANGGOTA Dto
13. SAHUDIN	ANGGOTA Dto

2. FRASKSI HANURA

ASSALMU'ALAIKUM. WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
ALLHAMDULILLAH, ALHAMDULILLAHHIRABBIL 'ALAMIN WASSALATU WASSALAMU 'ALA ASRAFIL 'AMBYA'
MURSALIN WA'ALA ALIHI WASAHBIHI RASULILLAH AZMAIN. AMMA BAGDU

- YANG KAMI HORMATI SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG KAMI HORMATI SAUDARABUPATI /WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA,
- YANG KAMI HORMATI, SEKDAKAB, SEKWAN, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT SAUDARA PIMPINAN ORGANISASI, PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PEMUDA, PIMPINAN LSM, SERTA UNDANGAN SEKALIAN YANG SANGAT-SANGAT KAMI MULIAKAN.

PATUTLAH KITA UCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG MANA ATAS RAHMAT DARI-NYA KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARI PURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUNA MEMBAHAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN AGENDA MENDENGARKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

SEMOGA DENGAN DILAKSANAKANNYA RAPAT PARI PURNA INI MAKA PEMBANGUNAN ACEH TENGGARA INI DAPAT TERUS DI TINGKATKAN KEDEPANNYA.

TIADA HENTI-HENTINYA SHALAWAT BESERTA SALAM SELALU KITA HATURKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW SEMOGA KITA MENJADI BARISAN TERDEPAN DALAM MENJALANKAN SUNAH BELIAU HINGGA AKHIR HAYAT KITA.

AMIN YARABBAL'ALAMIN

UCAPAN TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM INI.



UCAPAN TERIMAKASIH JUGA KAMI HATURKAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAS PENYAMPAIAN NOTA LAPORAN KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA TAHUN 2017 BEBERA SAAT YANG LALU.

SAUDARA KETUA, SAUDARA BUPATI DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

APA YANG KITA LAKSANAKAN PADA SIANG YANG SANGAT BERBAHAGIA INI MERUPAKAN AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP RAKYAT BUMI SEPAKAT SEGENEP INI SEBAGAIMANA TELAH DI ATUR DAN DI TETAPKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA .

DENGAN MEMPERHATIKAN SECARA SEKSAMA MAKA ADA BEBERAPA POINT YANG KAMI ANGGAP PENTING UNTUK DI SAMPAIKAN DALAM PANDANGAN UMUM INI DENGAN BUTIR-BUTIR SEBAGAI BERIKUT.

1. FRAKSI HANURA MENGHARAPKAN BAHWA SETIAP PELAKSANAAN BELANJA DAERAH HARUS BERPEGANG TEGUH PADA PRINSIP, TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN SERTA SEJALAN DENGAN GARIS-GARIS YANG TELAH DI TETAPKAN MELALUI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MAUPUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG YANG BENAR-BENAR BERMAMFAAT UNTUK RAKYAT.
2. FRAKSI HANURA JUGA MENINGATKAN SAUDARA BUPATI DALAM HAL INI PIHAK INSPEKTORAT UNTUK DAPAT TERUS MELAKUKAN PENG-EPEKTIFAN, MONITORING DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BELANJA DAERAH BAIK BELANJA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEHINGGA BELANJA-BELANJA ITU DAPAT LEBIH EFESIEN LAGI.
3. FRAKSI KAMI HANURA JUGA MENDORONG SEGALA KEBIJAKAN SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK MELAKUKAN PENATAAN ASET DAERAH AGAR TIDAK ADA LAGI OKNUM PEJABAT YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SESUKA HATI DAN SEMENA-MENA DALAM PENGGUNAAN ASET MILIK DAERAH TERSEBUT.
4. FRAKSI HANURA MEMANDANG PERLU ADA LANGKAH DAN GEBAKAN TERSENDIRI DARI SAUDARA BUPATI UNTUK PEMBERANTASAN NARKOBA, MENINGAT NARKOBA SAAT INI SUDAH MERAMBAH KE ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR, INI PUN KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA AGAR GENERASI PENERUS KITA TIDAK KETERGANTUNGAN DENGAN BARANG HARAM TERSEBUT.
5. TERAKHIR KAMI MENYAMPAIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAR DAPAT KIRANYA MEMERINTAHKAN PIHAK KEUANGAN AGAR DAPAT MERELAISIKAN TULAH (TUNJANGAN LELAH) DARI KEPALA DESA BESERTA PERANGKATNYA, IMEUM MUKIM BESERTA PERANGKATNYA. MENINGAT PARA PIMPINAN DESA INI SUDAH BEBERAPA BULAN BELUM MENERIMA HAKNYA.

SAUARA BUPATI DAN TAMU UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN.

SEBELUM PANDANGAN UMUM INI KAMI AKHIRI KAMI DARI FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT MENGAPRESIASI SETINGGI-TINGGINYA ATAS KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM HAL PEROLEHAN OPINI WTP(WAJAR TAMPAN PENGECUALIAN) MENINGAT MASA KEPIMPINAN NYA BELUM GENAP SATU TAHUN, SEMOGA UNTUK TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA INI DAPAT KITA PERTAHANKAN DAN DAPAT DITINGKATKAN.

DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM FRAKSI HATI NURANI RAKYAT INI KAMI SAMPAIKAN BESAR HARAPAN KAMI POIN-POIN DAN CATATAN-CATATAN YANG KAMI SAMPAIKAN DALAM PANDANGAN UMUM INI MENDAPAT TANGGAPAN DARI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH
ASSALAMMU 'ALAIKUM WARAH MATULLAHI
WABARAKATUH

KUTACANE, 01 AGUSTUS 2018
FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

MUHAMMAD DAUD	KETUA	_____ Dto_____
RAIDIN	WAKIL KETUA	_____ Dto_____
JAMUDIN SELIAN	ANGGOTA	_____ Dto_____
USMAN EFENDI	ANGGOTA	_____ Dto_____
JEMINAH	ANGGOTA	_____ Dto_____ -----

3. FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN

ASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA SEKDAKAB, PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE - ACEH TENGGARA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN



PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA YANG TELAH MENJADIKAN KITA SEBAGAI HAMBAA-HAMBANYA YANG BERIMAN, YANG TELAH MENUNJUKKAN KEPADA KITA JALAN SHIRATAL MUSTAQIM, JALAN YANG LURUS, YAITU JALAN YANG TELAH DITEMPUH OLEH ORANG-ORANG YANG TELAH DIBERI NIKMAT OLEH ALLAH SWT DARI KALANGAN PARA NABI, SHIDDIQIN, SYUHADA' DAN SHALIHIN. DAN SELANJUTNYA KITA UCAPKAN RASA SYUKUR ATAS NIKMAT ALLAH SEHINGGA KITA MASIH DAPAT HADIR DI RUANGAN YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRK

ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE II TAHUN 2018, TENTANG RANCANGAN QANUNPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA YANG SE-AQIDAH DENGAN KAMI MARI BERSAMA-SAMA SHALAWAT BERANGKAIKAN KITA SANJUNGGAN KEHARIBAAN JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG MANA BELIAU TELAH BERSUSAH PAYAH MEMBIMBING KITA SEMUA DARI ALAM KEBODOHAN MENUJU ALAM YANG PENUH ILMU PENGETAHUAN SEBAGAIMANA YANG KITA RASAKAN PADA SAAT SEKARANG INI.

SAUDARA BUPATI DAN PIMPINAN YANG KAMI HORMATI .

TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN YANG DI BERIKAN KEPADA KAMI SEHINGGA KAMI DAPAT MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM INI, YANG BERFOKUS PADA MASALAH KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH DAN SEKITAR TEMUAN DARI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (LHP BPK RI) APBK 2017.

PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

TERHADAP PERTANGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK 2017 INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN SARAN DAN MASUKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI IZINKAN KAMI FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGGARA SERTA SEMUA PIHAK YANG TELAH TERLIBAT BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS KERJASAMA YANG TELAH DI JALIN DENGAN DPRK ACEH TENGGARA SERTA KERJA KERAS YANG TELAH DI LAKUKAN SELAMA INI DALAM HAL PENGELOLAAN APBK ACEH TENGGARA SELAMA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG LALU SEHINGGA KITA BERSAMA DAPAT MERAHAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK – RI PERWAKILAN ACEH PADA TAHUN INI UNTUK YANG KEDUA KALINYA. SUNGGUH HAL INI SEBUAH PRESTASI YANG LUAR BIASA DAN SANGAT MEMBANGGAKAN DAN KALI KEDUA DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA KITA MERAHAI OPINI WTP DARI BPK RI, SEHINGGA MEMBUAT KITA TERHARU DAN BERSYUKUR. TENTU PRESTASI INI PATUT KITA BERI ANCUNGAN JEMPOL KARENA WTP ADALAH DAMBAAN KITA SEMUA. SEBAGAIMANA KAMI SELAMA INI SECARA TERUS – MENERUS MENDORONG DAN MEMOTIVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMANDANGAN UMUM DAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI – FRAKSI DI DPRK ACEH TENGGARA AGAR MEMPEROLEH WTP DARI BPK RI. ALHAMDULILLAH SEKARANG INI SUDAH KITA DAPATKAN DAN INSHA ALLAH KITA AKAN MENDAPATKAN REWARD ATAU INTENSIF TAMBAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT ATAS PRESTASI INI. KEMUDIAN KAMI HARAPKAN AGAR PRESTASI INI DAPAT TERUS KITA PERTAHANKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG.
2. PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG DIDASARKAN PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ADALAH MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH, DENGAN MAKSUD AKAN MEMPERCEPAT PROSES PEMBANGUNAN SECARA NASIONAL, PELAKSANAAN PEMERINTAHAN TERSEBUT TENTUNYA AKAN BERHASIL MANAKALA DIDUKUNG DENGAN PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DAPAT DI IMPLEMENTASIKAN SECARA TEPAT, MENDAPATKAN PARTISIPASI DARI MASYARAKAT, DIDUKUNG DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI, DILAKSANAKAN SECARA BAIK, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKUALITAS. DARI SEDERET RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTUNYA DIKUTI OLEH KOMITMEN BERSAMA ANTARA PELAKSANA PEMERINTAHAN DAERAH ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF.
3. GUNA MEWUJUDKAN SELURUH KEINGINAN BERSAMA TERSEBUT SERTA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN TERSEBUT TENTUNYA DALAM FUNGSI DEWAN SEBAGAI LEMBAGA LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN MENJADI HUBUNGAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA TERSEBUT, SEHINGGA MITRA LEMBAGA DAERAH TERSEBUT DAPAT BERJALAN SEIRING SEIRAMA SECARA WAJAR DAN PROPORSIONAL.
4. BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 TENTUNYA KAMI DPRK ACEH TENGGARA AKAN BERTUGAS MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAH DAERAH SECARA BERMARTABAT DAN PROPORSIONAL, MEGINGAT BAHWA LAPORAN TERSEBUT DIATAS MENJADI SANGAT PENTING MENDAPATKAN PERHATIAN KITA BERSAMA, HAL INI DIMAKSUDKAN SUPAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN MENJADI LEBIH TERKONTROL DAN TERKENDALI. DPRK SEBAGAI PEMANGKU TUGAS PENGAWASAN HARUS DAN WAJIB MENCERMATI HASIL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DENGAN MAKSUD KEDEPAN BAHWA KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI UNTUK TETAP DIPERTAHANKAN, SEMENTARA KEKURANG SEMPURNAAN DAPAT DIPERBAIKI GUNA MENCAPAI HASIL YANG LEBIH OPTIMAL LAGI DI KEMUDIAN HARI.
5. PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK 2017 INI ADALAH SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI UPAYA UNTUK MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENCERMINKAN SUATU PRINSIP DASAR PENEGAKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM SEMUA TAHAPAN MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN MAUPUN PERTANGGUNG JAWABANNYA. OLEH KARENA ITU PRINSIP AKUNTABILITAS PUBLIK HARUS DI BERLAKUKAN PADA SEMUA LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KEDEPAN AGAR MEREKA BEKERJA DI ATAS LEGALITAS DAN LEGITIMASI MASYARAKAT.

6. DALAM STRUKTUR POLA ALOKASI POLITIK ANGGARAN MERUPAKAN SUATU AGENDA TAHUNAN YANG MERUPAKAN AKTUALISASI DAN PELAKSANAAN RENCANA JANGKA PENDEK SERTA KEBIJAKAN UMUM APBK YANG DISEPAKATI DALAM SATU TAHUN, MAKA UNTUK ITU KAMI MENGHARAPKAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAR TETAP MELAKUKAN KONTROL TERHADAP DISIPLIN PENGGUNAAN ANGGARAN KEDEPAN AGAR FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KOMITMEN APARATUR PADA KEDISIPLINAN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DAPAT KITA ATASI BERSAMA,
7. BAHWA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. MAKA SEMUA TEMUAN LHP BPK RI YANG MASIH ADA WALAU HANYA SEDIKIT LAGI KIRANYA PERLU MENDAPAT PERBAIKAN DAN PENYELESAIAN DARI KITA BERSAMA SECARA TUNTAS. BERIKUT INI CATATAN-CATATAN DAN MASUKAN YANG DARI FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN ATAS TEMUAN LHP BPK RI UNTUK DAPAT DI JELASKAN ATAS KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DI HADAPI OLEH SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERUTAMA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN KEPADA KAMI AGAR DAPAT MENDAPAT PERHATIAN SERIUS KEDEPAN DIANTARANYA YAITU :
1. PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS PADA SD NEGERI DAN SMP NEGERI BELUM MELALUI MEKANISME APBK.
 - BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI BAHWA PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PECAATAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS MENUNJUKKAN BAHWA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERASAL DARI DANA BOS TIDAK DI ANGGARKAN DALAM APBK 2017 MAUPUN PERUBAHAN APBK 2017. HAL INI TIDAK SESUAI DEGAN PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STADAR AKUTANSI PEMERINTAH, PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERMEDAGRI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIOAL SEKOLAH.
 2. PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BELUM SEPENUHNYA MEMADAI.
 - SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SELURUHNYA DI SETOR KE KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2017.
 - KETERLAMBATAN PERTANGGUNG JAWABAN SP2D TU DA PEYETORAN SISA TU.
 - TERDAPAT SISA U.P DAN T.U YANG TIDAK DI KUASAI OLEH BENDAHARA PENGELUARAN.
 - BENDAHARA PENGELUARAN SKPK/UPTD TIDAK MEYUSUN DAFTAR TRANSAKSI HARIAN DAN TERDAPAT KETERLAMBATAN PENYETORAN PERHITUGAN PIHAK KETIGA (PFK) KE KAS NEGARA.
 3. PENGELOLAAN ASET BELUM SEPENUHYA MEMADAI.
 - INFORMASI PADA KARTU INVETARIS BARANG (KIB) BELUM SESUAI KETETUAN.
 - TERDAPAT ASET TETAP YANG TERCATAT GANDA.
 - PENCATATAN KONDISI ASET TETAP TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA.
 - PENGELOLAAN BATUAN PEMERINTAH PUSAT BELUM SELURUHNYA PENERIMAAN BANTUAN TERSEBUT DI LAPORKAN PEROLEHAN ASET TETAPNYA.
 4. PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TEGGARA TIDAK MEGACU PADA KETENTUAN DAN TIDAK MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
 - PENGANGGARAN BELANJA TIDAK PROPORSIOAL DENGAN PENGANGGARAN PENDAPATAN.
 - PENGANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TIDAK MENGACU PADA DASAR KETENTUAN.
 - PENGANGGARAN BELANJA DAERAH TIDAK MEMPEDOMANI KETENTUAN.
 5. KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BELAJA HIBAH DAN BELANJA MODAL.
 - TERDAPAT KESALAHAN PENGANGGARAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN SUBSTANSINYA. DIMANA BELANJA UNTUK JASA KONSULTASI ATAS PEKERJAAN FISIK DENGAN MASA MANFAAT LEBIH DARI 12 BULAN YANG SEHARUSYA TERMASUK DALAM BELANJA MODAL.
 - TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK) TIDAK CERMAT DAN TIDAK BEKERJA SECARA OPTIMAL DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI USULAN ANGGARAN DAN.
 - KEPALA SKPK TERKAIT KURANG CERMAT DALAM MENYUSUN RKA-SKPD DAN DPA SKPD.
 6. PENGELOLAAN KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH BELUM MEMADAI.
 - PENGENDALIAN DANA – DANA KHUSUS BELUM OPTIMAL.
 - KAS PEMERINTAH BERPOTENSI TIDAK DAPAT MENUTUPI HUTANG DAN MEMBEBANI TAHUN BERIKUTNYA.
 - PENGELOLAAN PERHITUGAN PIHAK KETIGA (PFK) ATAS BELANJA DAERAH BELUM OPTIMAL.
 - PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MILIK PEMERINTAH ACEH TEGGARA TIDAK OPTIMAL.
 - PELAPORAN OLEH KUASA BUD BELUM OPTIMAL
 7. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BATUAN KEUANGA KEPADA DESA BELUM SESUAI KETETUAN.
 - DANA KUTE TAHAP I DAN TAHAP II TERLAMBAT DI SALURKAN.
 - DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TIDAK DI ANGGARKAN.
 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA KUTE BELUM OPTIMAL.
 8. PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH BELUM MEMADAI.
 - PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KITA BELUM MEMILIKI DATA WAJIB PAJAK DAN DALAM HAL PENAGIHAN BELUM MENERAPKAN QANUNNOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK DAERAH.
 - PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH DIMANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS TIDAK DI LAKUKAN PERBULAN SESUAI DENGAN YANG DI TETAPKAN.
 9. PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELAJA HIBAH BELUM SESUAI KETENTUAN.
 - PERBUP TERKAIT PEMBERIAN HIBAH BELUM SEPENUHNYA MENGACU KEPADA PERMEDAGRI YANG

MENGATUR PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH.

- BELANJA HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL BELUM PERNAH DI LAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN.
- DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG PADA BEBERAPA SKPK MASIH BELUM DI SERTAI USULAN PENERIMA HIBAH.
- PENGANGGARAN HIBAH BERUPA BELANJA BARANG UNTUK DI SERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT TIDAK MEMPERTIMBANGKA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

8. SEBAGAI PENUTUP DARI PEMANDANGAN UMUM INI AKAN KAMI SAMPAIKAN SEBUAH LAPORAN DARI MASYARAKAT YANG KAMI TERIMA AGAR MENJADI PERHATIAN DARI KITA SEMUA TENTANG PENJUALAN IKAN LAUT ATAU IKAN ES YANG MEMILIKI RASA YANG BERBEDA ANTARA YANG DI PASARKAN DI PAJAK PAGI ATAU YANG BERASAL DARI MEDAN DENGAN IKA LAUT YANG DI PASARKAN DI PINGGIRAN JALAN ATAU YANG BERASAL DARI ACEH. DUGAAN MASYARAKAT SEMENTARA INI BAHWA IKAN LAUT YANG DARI MEDAN INI DI DUGA BERFORMALIN. ANDAI LAPORAN INI BETUL TENTU INI SANGAT BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT KITA. MAKA ATAS LAPORAN MASYARAKAT INI KAMI MINTA KEPADA PIHAK TERKAIT MELALUI SAUDARA BUPATI UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DA TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MASYARAKAT INI SECARA KONKRIT DEMI TERJAGANYA KESEHATAN MASYARAKAT KITA.

DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM INI KAMI SAMPAIKAN DALAM SIDANG PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE II TAHUN 2018 INI DAN SEKALI LAGI KAMI SAMPAIKAN BAHWA SELURUH RANGKAIAN TEMUAN PADA LHP BPK RI YANG TELAH KAMI PAPARKAN DI ATAS AGAR DAPAT MENJADI PERHATIAN DAN PERBAIKAN KEDEPAN.

MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN TERIMAKASI ATAS SEGENAP PERHATIAN.

WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB
KUTACANE, 01 AGUSTUS 2018

FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. H.M.SOPIAN DESKY.SAg (KETUA) | 1.....Dto..... |
| 2. Ir.BUDIMANSYAH (WAKIL KETUA) | 2.....Dto..... |
| 3. KAMIRUN MUNTHE (SEKRETARIS) | 3.....Dto..... |
| 4. T.DEDY FAISAL.ST (ANGGOTA) | 4.....Dto..... |
| 5. NURLELAWATI (ANGGOTA) | 5.....Dto..... |
| 6. SOFIAN EFFENDI (ANGGOTA) | 6.....Dto..... |

4. FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT

ASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, IZINKAN KAMI DARI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEAHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERI KITA LIMPAHAN NIKMAT DAN KURUNIA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE II TAHUN 2018, TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA, BAGI YANG SEAKIDAH DENGAN KAMI, SELAWAT BERIRINGKAN SALAM MARI SAMA-SAMA KITA SANJUNGAN KEHARIBAN JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH MEREFORMASI UMMAT DARI ALAM KEBODOHAN MENUJU ALAM YANG PENUH DENGAN ILMU PENGETAHUAN SEPERTI YANG KITA RASAKAN PADA SAAT INI. .

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHOMAT

- ❖ MENGAWALI PENDAPAT AKHIR FRAKSI INI PERTAMA-TAMA KAMI SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG TELAH MENYUSUN DAN MENYELESAIKAN SALAH SATU TUGASNYA SELAKU KEPALA DAERAH YAKNI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, YANG SAMA-SAMA KITA KETAHUI PENCAPAIANNYA CUKUP POSITIF BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017, KIRANYA DAPAT DI TINGKATKAN DAN DIPERTAHANKAN ATAS CAPAIAN PRESTASI WAJAR TANPA PENGECUALIAN TERSEBUT.



- ❖ PEMBAHASAN DAN PENILAIAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEPALA DAERAH INI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN KEPALA DAERAH DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.
- ❖ BAHWA SEBAGAIMANA LAZIM DILAKUKAN DAN SESUAI PEDOMAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, MAKA FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA 2017 INI SECARA UMUM MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP INDIKATOR DAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DIMANA HAL TERSEBUT MENGACU KEPADA REALISASI ANGGARAN APBK 2017 DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- ❖ DARI JAWABAN SAUDARA BUPATI TADI, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KESUNGGUHAN MERESPON SETIAP SARAN PENDAPAT DARI SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG DIKEMAS DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, NAMUN DEMIKIAN, TINDAK LANJUT DARI RESPON TERSEBUT JAUH LEBIH PENTING DAN KAMI HARAPKAN DITAHUN YANG AKAN DATANG AGAR DAPAT KONSISTEN MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHAKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN YANG KITA HARAPKAN.
- ❖ BERKAITAN DENGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 YANG SEBENTAR LAGI AKAN KITA SEPAKATI BERSAMA, BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN PADA PENDAPAT AKHIR FRAKSI YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DALAM HAL MINIMNYA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, SAUDARA BUPATI TELAH MENJAWAB PANDANGAN UMUM KAMI DENGAN BIJAK, TERKAIT DENGAN SANKSI KEPADA SKPK APABILA KINERJA APARATUR YANG MEMBIDANGI DALAM HAL MENANGANI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN JUGA MENGAPRESIASI KOMITMEN SAUDARA BUPATI DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR, MAKA DENGAN DEMIKIAN, FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENINGKANTIKAN DALAM TAHUN BERIKUTNYA AGAR CAPAIAN PAD DAPAT TEREALISASI SECARA MAKSIMAL.
2. BELANJA DAERAH
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH, BAHWA BELANJA DAERAH TERBAGI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TAK TERDUGA SERTA BELANJA TRANSFER, YANG DIRENCANAKAN Rp. 1. 543. 106. 761. 941 (SATU TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIYAR SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH), DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp. 1. 343. 790. 069. 489 (SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU 87,08 PERSEN, DENGAN ANGKA TERSEBUT DAPAT KITA LIHAT SECARA UMUM BAHWA REALISASI CAPAIAN BELANJA DAERAH HAMPIR SESUAI DENGAN TARGET, MAKA FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENINGKANTIKAN KONSISTENSI AKUNTABILITI PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN APBK SEHINGGA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DIHADAPAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA.
3. REALISASI PEMBIAYAAN
REALISASI PEMBIAYAAN TERDIRI DARI REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH, REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TEREALISASI 76,99 PERSEN DARI DIRENCANAKAN, SEHINGGA MENGHASILKAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2017 SEBESAR SEMBILAN PULUH TIGA MILIYAR TUJUH RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS TIGA RIBU TIGA PULUH TUJUH RUPIAH, HAL INI MERUPAKAN DIKARNAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG KURANG BAIK, DENGAN DEMIKIAN PERLUNYA KECERMATAN DAN AKURASI DALAM PERENCANAAN KEDEPANNYA.
4. TERKAIT DENGAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PDAM SEBAGAI TIRTA AGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPASILITASI PDAM SEBAGAI SALAH SATU BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUJUAN AGAR TIDAK TERKENDALA DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS BUMD TERSEBUT, NAMUN KAMI MASIH MENDENGAR PELAYANAN BUMD TERSEBUT MASIH KURANG PRIMA, MOHON KIRANYA DIPERHATIKAN KINERJA BUMD TERSEBUT GUNA MASYARAKAT MENDAPATKAN PELAYANAN YANG BAIK, MENINGAT AIR ADALAH SUMBER KEHIDUPAN.

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT

- ❖ APA YANG KAMI SAMPAIKAN DIATAS ADALAH BENTUK KOMITMEN DAN KECINTAAN KAMI DARI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT TERHADAP KEMAJUAN BUMI SERAMBI MEKAH SEPAKAT SEGENEP KABUPATEN ACEH TENGGARA, MAKA BERDASARKAN INDIKATOR LHP BPK, DENGAN INI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT UNTUK MENYETUJUI RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018

PESERTA PARI PURNA YANG KAMI MULIAKAN.

- ❖ DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2017.
- ❖ AKHIRNYA KEPADA TUHAN KAMI MEMOHON AMPUN KEPADA SEGENAP MASYARAKAT KAMI MOHON MAAF, TERIMAKASIH
WASSALAMU'ALAIKUM WR WBR.



KETUA : H. JOHANUDDIN, DESKY (.....Dto.....)
WAKIL KETUA : BUSTAMI ACEH (.....Dto.....)
SEKRETARIS : TIMBUL H. SAMOSIR (.....Dto.....)
WKL SEKRETARIS : SUPIAN SEKEDANG (.....Dto.....)
ANGGOTA : NAZARUDIN (.....Dto.....) -----

DENGAN BERAKHIRNYA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI TADI ----- MAKA BERAKHIRLAH ACARA KITA UNTUK HARI INI. ACARA AKAN DILANJUTKAN BESOK HARI ----- DENGAN AGENDA JAWABAN SAUDARA BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRKASI-FRAKSI ----- KAMI MENGHARAPKAN SAUDARA BUPATI DAPAT MERSPON PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TADI DENGAN CUKUP JELAS, TERPERINCI RASIONAL DAN JELAS
KAMI AKHIRI BILLAHI TAUFIQ WALHI DAYAH WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB -----

II PEMBICARAAN TINGKAT II

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

BERDASARKAN DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA YANG TELAH MENANDATANGANI ABSENSI, SESUAI DENGAN KETENTUAN TATA TERTIB – TELAH MEMENUHI QOURUM UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG II TAHUN 2018 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 -----

BAHWA PADA RAPAT PARIPURNA KITA KEMAREN, AGENDA ADALAH PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DAN SEMUA TELAH MENYAMPAIKANNYA -----

KINI SAATNYA KITA MENGINJAK KE ACARA SELANJUTNYA --- DENGAN AGENDA ----- JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ----- KEPADA SAUDARA BUPATI ----- WAKTU DAN TEMPAT KAMI PERSILAHKAN -----

8. ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABRAKATUH SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN!

- YTH.KETUA DPRK ACEH TENGGARA
- YTH. PARA UNSUR FORKOMPIMDA ACEH TENGGARA;
- YTH. PARA WAKIL KETUA, PARA KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK;
- YTH.SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, STAF AHLI;
- YTH. SDR. PARA KEPALA OPD (SKPK), PARA KABAG. DAN CAMAT;
- YTH. SDR-SDR. DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;
- YTH. TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.
PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA BERKAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU YANG DIBERIKANNYA KITA DAPAT MELAKSANAKAN SIDANG PARIPURNA DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN NOTA JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 DAN DENGAN KARUNIA-NYA PULA KITA TELAH DAPAT MELAKSANAKAN RODA PEMERINTAHAN INI.

SELANJUTNYA SHALAWAT BERIRING SALAM TAK LUPA KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBERIKAN TAUHADAN KEPADA KITA DALAM MENJALANI KEHIDUPAN INI.

PADA KESEMPATAN INI IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH BESERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA ANGGOTA DEWAN TERHORMAT, YANG TELAH MENELITI, MENGAMATI DAN MENGADAKAN EVALUASI SEKALIGUS MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN.

BERIKUT INI AKAN KAMI JELASKAN ATAS PANDANGAN UMUM, PENDAPAT DAN SARAN-SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT :

I. PANDANGAN UMUM FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR H. M. SOPIAN DESKY, S.Ag.

SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, TERKAIT :

1. UNTUK MEMPERTAHAKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) KAMI SANGAT SEPENDAPAT, UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN SELURUH KEPALA SKPK MAMPU MENINGKATKAN KINERJA DAN MEMBUAT TEROBOSAN-TEROBOSAN BARU DALAM MENINGKATKAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA

- (ASN) YANG ADA DI LINGKUNGAN TEMPAT BEKERJA MASING-MASING TERUTAMA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN.
2. DALAM PROSES/TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TELAH MELAKUKAN UPAYA MULAI DARI MUSREMBANG DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN YANG NANTINYA USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN TERSEBUT AKAN DIBAWA KE MUSREMBANG PROVINSI DAN NASIONAL SEHINGGA SETIAP PROGRAM YANG TERTUANG PADA APBK/APBA MERUPAKAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS YANG LANGSUNG DAPAT DIMANFAATKAN HASILNYA OLEH MASYARAKAT LUAS. UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN KEPADA KEPALA SKPK UNTUK MELAKSANAKAN SELURUH PROGRAM KEGIATAN YANG SUDAH DIRENCANAKAN DAN TETAP MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
 3. KAMI SANGAT SETUJU DENGAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN SEBAGAI LEMBAGA LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN SEHINGGA SETIAP PROGRAM YANG DIRENCANAKAN PEMERINTAH DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.
 4. SARAN ANGGOTA DEWAN UNTUK TERUS MENGAWASI JALANNYA SELURUH PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DALAM SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SKPK KAMI SANGAT SEPENDAPAT DAN KEPADA INSPEKTORAT AGAR MELAKSANAKAN FUNGSI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
 5. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA SUDAH MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DAN SUDAH DIAUDIT OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
 6. DALAM HAL PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA HAL INI AKAN TERUS KITA UPAYAKAN DENGAN MENERAPKAN REWARD AND PUNISMENT DALAM PENEKAKAN DISIPLIN ASN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA. KEMUDIAN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN TETAP MENGACU PADA PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS PADA SETIAP SKPK.
 7. SARAN ANGGOTA DEWAN UNTUK TERUS MENINDAKLANJUTI SELURUH TEMUAN PEMERIKSAAN KAMI SANGAT SETUJU SEHINGGA KEDEPAN SELURUH TEMUAN PEMERIKSAAN DAPAT DISELESAIKAN SECEPATNYA, UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN KEPADA INSPEKTORAT AGAR MENYAMPAIKAN SETIAP HASIL TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA DPRK ACEH TENGGARA, SELANJUTNYA :
 1. UNTUK PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS PADA SD NEGERI DAN SMP NEGERI BELUM MELALUI MEKANISME APBK PADA TAHUN ANGGARAN 2017 HAL INI DISEBABKAN KARNA KETERLAMBATAN MEMPEROLEH DATA DARI DINAS PENDIDIKAN. SELANJUTNYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018 AKAN KITA ANGGARKAN PENDAPATAN DAN BELANJANYA PADA APBK PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 INI.
 2. PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BELUM MEMADAI DAPAT KAMI JELASKAN :
 - SISA UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH UANG (TU) BELUM SELURUHNYA DISETOR KE KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2017, NAMUN UNTUK SAAT INI UANG TERSEBUT SUDAH DI TINDAK LANJUTI DAN DISETOR KE KAS DAERAH SELURUH NYA PADA TANGGAL 06 JUNI 2018.
 - KETERLAMBATAN PERTANGGUNGJAWABAN SP2D TAMBAH UANG (TU), HAL INI SUDAH KITA TERTIBKAN DENGAN MEMBERIKAN BATASAN SETIAP USULAN PENGAJUAN TAMBAH UANG DARI SKPK TERKECUALI UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT MENDESAK DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABAN DALAM WAKTU 1 BULAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 PASAL 202 AYAT (4).
 - TERDAPAT SISA UANG UP DAN TU YANG TIDAK DIKUASAI OLEH BENDAHARA PENGELUARAN, DALAM HAL INI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA SUDAH MENGELUARKAN SURAT EDARAN TUTUP BUKU SETIAP TAHUNNYA BAHWA SISA UP DAN TU YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN HARUS DISETOR KE KAS DAERAH PALING LAMBAT 31 DESEMBER TAHUN BERJALAN
 - BENDAHARA PENGELUARAN SKPK/UPTD TIDAK MENYUSUN DAFTAR TRANSAKSI HARIAN DAN TERDAPAT KETERLAMBATAN PENYETORAN PAJAK PIHAK KETIGA (PFK) KE KAS NEGARA. KEDEPAN KITA PASTIKAN BENDAHARA PENGELUARAN SELURUH SKPK WAJIB MENYUSUN TRANSAKSI HARIAN DAN UNTUK KETERLAMBATAN PENYETORAN PFK TAHUN 2017 SUDAH DISETOR SELURUHNYA PADA BULAN MEI TAHUN 2018 KE KAS NEGARA.
 3. PENGELOLAAN ASET BELUM SEPENUHNYA MEMADAI HAL INI DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA :
 - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN INFORMASI ASET MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIMDA) YANG DIBANTU PIHAK BPKP PERWAKILAN ACEH.
 - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA JUGA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP ASET YANG TERCATAT GANDA.
 - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA AKAN MENDATA KEMBALI SECARA BERTAHAP KONDISI ASET YANG SEBENARNYA MELALUI KEGIATAN INVENTARISASI ASET PADA SETIAP SKPK.
 - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA AKAN MENINGKATKAN PENDATAAN ATAS SETIAP BANTUAN TERKAIT DENGAN ASET YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT ATAU PIHAK LAINNYA.
 4. PENGANGGARAN TIDAK PROPORSIONAL TIDAK MENGACU KEPADA KETENTUAN KARENA KETERBATASAN KEMAMPUAN KEUANGAN YANG MASUK REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH, KERENA JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA SUDAH MENGURAS ANGGARAN HAMPIR 70% DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU), KEDEPAN KITA AKAN BERUSAHA MELAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP ANGGARAN YANG TIDAK DIPERLAKUKAN.
 5. SELANJUTNYA, KESALAHAN PENGANGGARAN DALAM BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH DAN BANSOS AKAN KITA LAKUKAN PERBAIKAN AGAR HAL INI TIDAK TERULANG KEMBALI. KESALAHAN DALAM PENGANGGARAN TERSEBUT TERJADI KARENA KETERBATASAN WAKTU YANG DIMILIKI TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK) DALAM MEMVERIFIKASI RKA SERTA PROPOSAL YANG DIAJUKAN SKPK DAN MASYARAKAT.

6. TENTANG PENGELOLAAN KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA :
 - DALAM PENGENDALIAN ANGGARAN YANG BELUM OPTIMAL, KEDEPAN KAMI AKAN MELAKUKAN PENGENDALIAN ANGGARAN SESUAI DENGAN SUMBER DAN PERUNTUKANNYA.
 - DALAM PENGELOLAAN KAS. KEDEPAN KITA AKAN LAKSANAKAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN DANA YANG TERSEDIA AGAR DAPAT MENUTUPI HUTANG DAN TIDAK AKAN MEMBEBANI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 - DALAM PENGELOLAAN PAJAK FIAK KETIGA (PFK) AKAN KITA MAKSIMALKAN BIDANG VERIFIKASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGONTROL POTONGAN PAJAK FIAK KETIGA DARI SKPK SESUAI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DENGAN BUKTI SETORAN PAJAK.
 - TENTANG PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MILIK PEMERINTAH KAMI AKAN MEMBUATKAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MENGATUR PELIMPAHAN DANA PEMERINTAH ACEH TENGGARA.
 - DALAM PELAPORAN KUASA BUD AKAN KITA MAKSIMALKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG TELAH DITENTUKAN
7. TERKAIT DENGAN DANA DESA TAHAP I SUDAH TEREALISASI PADA TAHUN BERJALAN (2017) SEMENTARA UNTUK DANA DESA TAHAP II TAHUN 2017 DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA HAL TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING KAS UMUM DAERAH PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2017 SEHINGGA HANYA BISA TEREALISASI SEBANYAK 75 DESA ATAU SEBESAR Rp.22.325.724.000,- KEMUDIAN SISA DANA DESA YANG BELUM TEREALISASI SABANYAK 110 DESA SEBESAR Rp.92.400.064.800,- DIANGGARKAN PADA TAHUN 2018 DAN SUDAH TEREALISASI SELURUHNYA PADA BULAN APRIL 2018. UNTUK BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SUDAH DIANGGARKAN PADA APBK TAHUN 2018 DALAM BENTUK BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK APARATUR DESA. SELANJUTNYA PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA KUTE AKAN TERUS DILAKSANAKAN SECARA BERKALA OLEH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.
8. UNTUK PENGELOLAAN PAJAK DAERAH AKAN KAMI TINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENATAKELOLAAN STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENETAPAN SKPD/SKRD SERTA MEKANISME PERHITUNGAN, PENAGIHAN DAN SOSIALISASI KE WAJIB PAJAK DAERAH BERSAMA DENGAN KANTOR PAJAK KUTACANE. DALAM HAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN DAN AKAN MENGENAKAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEWA KIOS.
9. TERKAIT DENGAN PEGANGGARAN, PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA USAHA UNTUK PERBAIKAN DALAM PERMASALAHAN HIBAH DAN BANSOS TERUS KITA LAKUKAN, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN SURAT YANG KITA KIRIMKAN KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 909/308/2018, TANGGAL 22 JUNI 2018 TENTANG PENYAMPAIAN DATA DANA HIBAH TAHUN 2017, SERTA MENAMPUNG SELURUH PROPOSAL UNTUK DIANGGARKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA SETELAH DIEVALUASI OLEH SKPK TERKAIT DAN TAPK.
10. MENINDAKLANJUTI LAPORAN DARI MASYARAKAT ADANYA IKAN LAUT YANG DIPASARKAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA KHUSUS YANG BERASAL DARI KOTA MEDAN DIDUGA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN TUBUH MANUSIA, HAL INI AKAN SEGERA KITA TINDAKLANJUTI UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN KEPALA DINAS KESEHATAN, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA UNTUK MEMASTIKAN PERMASALAH TERSEBUT DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI ACEH TENGGARA.

II. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR TGK. MUHAMMAD DAUD.

1. SARAN ANGGOTA DEWAN DALAM HAL PELAKSANAAN BELANJA DAERAH HARUS BERPEGANG TEGUH PADA PRINSIP TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN SERTA SEJALAN DENGAN GARIS-GARIS YANG TELAH DI TETAPKAN MELALUI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MAUPUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG YANG BENAR-BENAR BERMANFAAT UNTUK RAKYAT KAMI SANGAT SEPENDAPAT UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN SELURUH PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN PADA SKPK HARUS MENGACU PADA RPJMK MAUPUN RPJP KABUPATEN ACEH TENGGARA SEHINGGA SETIAP KEGIATAN AKAN TERENCANA DAN BERPANGKAP LANGSUNG BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
2. SARAN ANGGOTA DEWAN UNTUK MENINGKATKAN MONITORING DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BELANJA DAERAH BAIK BELANJA TIDAK LANGSUNG MAUPUN BELANJA LANGSUNG HAL INI AKAN TERUS DILAKUKAN SECARA BERKALA OLEH APARATUR PENGAWAS INTEREN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.
3. SARAN ANGGOTA DEWAN UNTUK MELAKUKAN PENATAAN ASET DAERAH DALAM HAL INI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KEDEPANNYA AKAN TERUS BERUPAYA MELAKUKAN PERBAIKAN DALAM HAL PENGELOLAAN ASET MILIK PEMERINTAH DENGAN MELIBATKAN PIHAK TERKAIT DAN PENGGUNAAN METODE SOSIALISASI PENGELOLAAN ASET DAN PENDAMPINGAN KEPADA PENGURUS ASET SKPK.
4. SARAN ANGGOTA DEWAN UNTUK MEMBERANTAS NARKOBA KAMI SANGAT SEPENDAPAT UNTUK ITU PADA TAHUN 2018 INI KAMI SUDAH MENGANGGARKAN DANA SEBESAR Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) UNTUK MEMBERANTAS NARKOBA DI BUMI SEPAKAT SEGENAP YANG KITA CINTAI INI.
5. KHUSUS UNTUK REALISASI DANA TULAH (TUNJANGAN LELAH) KEPALA DESA BESERTA PERANGKATNYA, IMEUM MUKIM BESERTA PERANGKATNYA HAL INI SUDAH KITA REALISASIKAN SAMPAI BULAN APRIL 2018 UNTUK BULAN MEI TAHUN 2018 SEDANG DALAM PROSES REALISASI.



III. PANDANGAN UMUM FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR H. JOHANUDDIN DESKY.

1. TERKAIT DENGAN MINIMNYA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA HAL TERSEBUT TERJADI KARENA LEMAHNYA KINERJA APARATUR YANG MEMBIDANGI HAL TERSEBUT SEHINGGA TARGET YANG DITETAPKAN TIDAK TERCAPAI, NAMUN DEMIKIAN KITA TETAP BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DENGAN SALAH SATUNYA ADALAH MELAKUKAN ROTASI APARATUR YANG MENANGANI HAL TERSEBUT AGAR KEDEPAN LEBIH BAIK LAGI, SELANJUTNYA KAMI MEMERINTAHKAN KEPADA SELURUH KEPALA SKPK YANG MENANGANI PENDAPATAN AGAR TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR KARENA KITA JUGA SUDAH MEMBENTUK TIM CYBER PUNGLI YANG MEMANTAU KEUANGAN DAERAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DI INSPEKTORAT.
2. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPK AGAR MENGANUT SISTEM EFISIENSI, EFEKTIF DAN EKONOMIS MERUPAKAN KEHARUSAN SEHINGGA PENGGUNAAN BELANJA PADA SKPK DAPAT TERUKUR DAN TEPAT SASARAN. KEDEPAN JUGA KAMI AKAN MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.
3. MENINDAKLANJUTI DANA DESA TAHAP II SUDAH DITAMPUNG PADA APBK 2018 DAN SEMUANYA SUDAH TEREALISASI PADA BULAN APRIL 2018. KEDEPAN KITA JUGA AKAN BERKOMITMEN AGAR INI TIDAK TERULANG LAGI.
4. TERKAIT DENGAN PENGANGGARAN DANA HIBAH SUDAH KAMI JELASKAN PADA JAWABAN ANGGOTA DEWAN TERHORMAT H.M. SOPIAN DESKY, S.Ag NAMUN DEMIKIAN, MASALAH PDAM DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA HIBAH TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MEMFASILITASI PDAM SEBAGAI SALAH SATU BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH AGAR TIDAK TERKENDALA DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS, NAMUN DEMIKIAN KEDEPAN KITA AKAN MENGARAHKAN ALOKASI ANGGARAN TERSEBUT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL. DAN UNTUK HIBAH TAHUN 2017 TERSEBUT SUDAH DIMASUKKAN DALAM PENYERTAAN MODAL PADA LAPORAN KEUANGAN PDAM TAHUN 2017.
5. SELANJUTNYA TENTANG ADANYA LAPORAN KERESAHAN MASYARAKAT MENGENAI KUALITAS BERAS RASKIN YANG DISALURAKAN KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU HAL INI AKAN KITA TINDAKLANJUTI DENGAN MEMERINTAHKAN KEPALA DINAS SOSIAL UNTUK MENELUSURI KEBENARAN LAPORAN MASYARAKAT TERSEBUT SEHINGGA KEDEPAN HAL INI TIDAK TERULANG KEMBALI.

IV. PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR GABE MARTUA TAMBUNAN.

1. TERKAIT DENGAN PERTANYAAN DEWAN YANG TERHORMAT TENTANG TIDAK PROPORSIONAL ANGGARAN PENDAPATAN DENGAN BELANJA DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SELISIH ANTARA PENDAPATAN DAN BELANJA TERSEBUT DITUTUPI DENGAN PEMBIAYAAN SEBESAR Rp.43.464.408.603,- (EMPAT PULUH TIGA MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN RIBU ENAM RATUS TIGA RUPIAH) SEHINGGA SILPA APBK TAHUN 2017 BERADA DALAM KEADAAN NIHIL.
2. BERHUBUNGAN DENGAN PENGANGGARAN RETRIBUSI SEBESAR Rp.38.708.081.500 (TIGA PULUH DELAPAN MILYAR TUJUH RATUS DELAPAN JUTA DELAPAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH) DILAKUKAN PADA NOMENKLATUR TERSEBUT NAMUN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIPINDAHKAN KE REKENING LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KARENA SUMBER DANANYA BERASAL DARI JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) SESUAI REKOMENDASI DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH.
3. TERKAIT DENGAN PERTANYAAN PENGANGGARAN YANG TIDAK MENGACU PADA KETENTUAN DAN TIDAK MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SUDAH KAMI JAWAB DALAM JAWABAN PERTANYAAN SAUDARA H.M. SOPIAN DESKY, S.Ag. NAMUN DEMIKIAN KAMI AKAN TERUS BERUPAYA UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN SESUAI KETENTUAN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIANLAH JAWABAN DAN PENJELASAN YANG KAMI SAMPAIKAN ATAS PERTANYAAN, USUL DAN SARAN TERHADAP PANDANGAN UMUM ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017.

KAMI MENYADARI BAHWA SEMUA PERTANYAAN MAUPUN SARAN DAN USUL ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ADALAH DEMI KEPENTINGAN DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA, UNTUK ITU KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KARENA MASUKAN DAN SARAN TERSEBUT AKAN MENJADI BAHAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DI MASA MENDATANG.

KAMI JUGA MENYADARI BAHWA JAWABAN DAN PENJELASAN YANG DISAJIKAN BELUMLAH SEMPURNA NAMUN ATAS PENGERTIAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK, SEMUA DAPAT DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN RENCANA. INSYA ALLAH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 DAPAT DITETAPKAN MENJADI QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

AKHIRNYA MARILAH KITA BERSERAH DIRI KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERAYA MEMINTA TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MUDAH-MUDAHAN KITA MENDAPAT PETUNJUK DAN KARUNIA-NYA.
TERIMA KASIH.

WABILLAH TAUFIQ WALHIDAYAH
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

KUTACANE, 02 AGUSTUS 2018
BUPATI ACEH TENGGARA,

Dto,

Drs. RAIDIN PINIM, M.AP-----

KINI KIITA MEMASUKI ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI ATAS JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018 YAITU :

1. FRAKSI GOLKAR

SELAMAT SIANG, SALAM INDONESIA RAYA
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH, SYALOM, HOM SWASTU SWASTU HOM NAMU BUDAYA,

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT, PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA
- REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN

DENGAN BERSERAH DIRI DAN RASA IKHLAS YANG TULUS MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KITA KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS BERKAT DAN RAHMAT-NYA PADA HARI INI KITA SEMUA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN PIKIRAN YANG JERNIH UNTUK BERSAMA-SAMA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA SIDANG II TAHUN 2018 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA HARI INI DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG SAMA-SAMA KITA BANGGAKAN INI.

SAUDARA PIMPINAN, BUPATI, SERTA ANGGOTA DEWAN SERTA PARAHADIRIN YANG KAMI HORMATI

SETELAH MEMBACA DAN MENCERMATI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017, DAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017, MAKA IJINKAN KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, PENDAPAT AKHIR KAMI INI SEMATA-MATA BERTUJUAN MENGAMBIL PELAJARAN DARI PELAKSANAAN APBK 2017 INI, ADAPUN SARAN DAN KERITIKAN TIDAK LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK PERBAIKAN DI MASA MENDATANG.

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 INI MEMILIKI ARTI YANG SANGAT PENTING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA, DAN DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI BAHAN KOREKSI DAN EVALUASI BAGI PIHAK EKSEKUTIF UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN, PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEDEPAN MENJADI YANG LEBIH BAIK LAGI, DEMI TERSAJINYA LAPORAN YANG TERANSIPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA. PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN LAPORAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH AKAN SANGAT PENTING DALAM RANGKA UNTUK MENCIPTAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EKONOMIS, EFESIEN, DAN EFEKTIVE, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN OPINI "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" BUKAN HANYA SEBATAS TARGET DAN TUJUAN SAJA, SEPERTI KATA-KATA BIJAK BANYAK ORANG YANG MERASA BISA TAPI SEDIKIT ORANG YANG BISA MERASA.

SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PEMBAHASAN DAN PENILAIAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEPALA DAERAH INI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TUJUAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

BAHWA BAGAIMANA SEHARUSNYA DILAKUKAN DAN SESUAI PEDOMAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA FRAKSI GOLKAR DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA 2017 INI, SECARA UMUM MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP INDIKATOR DAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DIMANA HAL TERSEBUT MENGACU KEPADA REALISASI ANGGARAN APBK 2017 DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI.



DARI JAWABAN SAUDARA BUPATI TADI PAGI, KAMI DARI FRAKSI GOLKAR UCAPKAN TERIMAKASIH ATAS KESUNGGUHAN MERESPON SETIAP SARAN PENDAPAT DARI SELURUH ANGGOTA DEWAN, YANG DIKEMAS DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, NAMUN DEMIKIAN, TINDAKLANJUT DARI RESPON TERSEBUT JAUH LEBIH PENTING. DAN KAMI MEYAKINI BAHWA SAUDARA BUPATI DAN JAJARANNYA DAPAT MELAKUKAN SESUAI DENGAN APA YANG TELAH DISAMPAIKAN,

BERKAITAN DENGAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2017 YANG SEBENTAR LAGI KITA SEPAKATI BERSAMA, HENDAKNYA DALAM PELAKSANAAN MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS OLEH SAUDARA BUPATI.

ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN PADA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2017 INI, YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. TERKAIT PENGANGGARAN YANG TIDAK MENGACU PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SAUDARA BUPATI TELAH MENJAWAB DENGAN BAIK PADA PANDANGAN UMUM KAMI, MUDAH-MUDAHAN SAUDARA BUPATI DAPAT MELAKUKAN PERBAIKAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN
2. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA PEMERINTAH AGAR PATUH TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN YANG SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG KHUSUSNYA KETEPATAN WAKTU DAN JADWAL PEMBAHASAN DAN Pengerjaan.
3. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENGUSULKAN AGAR APBK BERPIHAK PADA MASYARAKAT ACEH TENGGARA SECARA KESELURUHAN PERLUNYA DI TETAPKAN PERSENTASE ANGGARAN DI SETIAP SKPK BAIK BELANJA LANGSUNG MAUPUN BELANJA TIDAK LANGSUNG, DAN MERENCANAKAN PROGRAM YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT, HAL INI KAMI ANGGAP PENTING UNTUK MEMASTIKAN ANGGARAN DARI SETIAP SKPK BETUL-BETUL MENGARAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK.

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT NAMUN KITA SEMUA MENYADARI TUJUAN DARI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ADALAH AGAR TERWUJUDNYA PENGELOLA KEUANGAN YANG AKUNTABEL' DAN DAPAT DI PERTANGGUNGJAWABKAN SERTA DAPAT MEMBERIKAN IMBASNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SEPERTI KATA PEPATAH IBARAT SEBUAH ANAK PANAH YANG DILEPASKAN DARI SEBUAH BUSUR YANG KUAT DAN TANGAN YANG KUAT, MATA YANG TAJAM, MULUT BICARA DALAM DOA, ANAK PANAH TERSEBUT BILA DI LEPASKAN AKAN MENGENAI TEPAT SASARAN, SESUAI APA YANG DI INGINKAN DAN YANG DI CITA-CITAKAN. KARENA EKSEKUTIFSEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN, SEMUA INI TIDAK AKAN TERCAPAI TANPA ADANYA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PENINGKATAN KUALITAS DAN PELAYAN PUBLIK, BAIK SECARA AKTUALITA DI LAPANGAN MAUPUN SECARA ADMINISTRATIF YANG BERUJUNG DI RAIHNYA OPINI " WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DI TAHUN BERIKUTNYA

SAUDARA PIMPINAN, BUPATI, SERTA ANGGOTA DEWAN SERTA PARA HADIRIN YANG TERHORMAT APA YANG KAMI SAMPAIKAN DIATAS ADALAH BENTUK KOMITMEN KAMI DARI FRAKSI GOLKAR TERHADAP KECINTAAN KAMI ATAS KEMAJUAN ACEH TENGGARA, BERDASARKAN INDIKATOR LHP BPK, DENGAN INI FRAKSI GOLKAR UNTUK MENYETUJUI RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, MENJADI QANUN ACEH TENGGARA TAHUN 2018

PIMPINANSIDANG, DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARI PURNA YANG KAMI MULIAKAN.... DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH SALAM INDONESIA RAYA.

KUTACANE, 02 AGUSTUS 2018

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRK
ACEH TENGGARA

- | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1. | HJ. SAMSIAR, SE | KETUA | Dto |
| 2. | HASANUSI | WAKIL KETUA | Dto |
| 3. | ARNOLD SH | SEKRETARIS | Dto |
| 4. | HJ. HELENA | ANGGOTA | Dto |
| 5. | IRWANDI DESKY,SP | ANGGOTA | Dto |
| 6. | Drs. H.M. YAMIN SAIPI | ANGGOTA | Dto |
| 7. | TAKDIR EDY WINTA, ST | ANGGOTA | Dto |
| 8. | HAPRI GUNAWAN | ANGGOTA | Dto |
| 9. | BARUDIN | ANGGOTA | Dto |
| 10. | INDIRA HAYATI | ANGGOTA | Dto |
| 11. | GABE MARTUA TAMBUNAN | ANGGOTA | Dto |
| 12. | IR. FELIX SUBRIANTO | ANGGOTA | Dto |
| 13. | SAHUDIN | ANGGOTA | Dto |

2. FRAKSI HANURA

ASSALMU'ALAIKUM. WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI SEMUA

- YTH SAUDARA BUPATI /WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA
- YTH SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA



- YTH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
- YTH SAUDARA SEKWAN ACEH TENGGARA
- YTH SAUDARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE KABUPATEN ACEH TENGGARA.
- SERTA PARA HADIRIN TAMU UNDANGAN SEKALIAN YANG SANGAT-SANGAT KAMI MULIAKAN.

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM SYUKUR ALHAMDULILLAH, MARI SAMA-SAMA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MELIMPahkan KEPADA KITA, RAHMAT NIKMAT DAN KARUNIANYA HINGGA DETIK INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN, BISA BERKUMPUL BERSAMA-SAMA DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA SHALAWAT BESERTA SALAM TERUS KITA PERSENBahkan KEPADA KEKASIH-NYA NABI AKHIRU ZAMAN YAKNI NABI MUHAMMAD SAW SEMOGA KITA BAGIAN DARI UMATNYA YANG SELALU DI RIDHOI.

SAUDARA PIMPINAN SIDANG
SAUDARA BUPATI /WAKIL BUPATI
DAN TAMU SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 INI DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI BAHAN KOREKSI DAN EVALUASI BAGI PIHAK EKSEKUTIF UNTUK PENINGKATAN, PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEHINGGA KE DEPANNYA DAPAT LEBIH BAIK LAGI DEMI TERWUJUDNYA LAPORAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABLE DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA KHUSUSNYA.

PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN LAPORAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH ITU SANGAT PENTING DALAM RANGKA UNTUK MENCIPTAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TAK HANYA EKONOMIS EFEKTIF DAN EFISIEN TETAPI JUGA PATUH KEPADA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG SEDANG BERLAKU.

PIMPINAN SIDANG DAN PARA HADIRIN
YANG KAMI HORMATI

SETELAH MENDALAMI DAN MENKAKJI SECARA DTAIL SEMUA JAWABAN SAUDARA BUPATI/WAKIL BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUMFRAKSI-FRAKSI MAKA KAMI DARI FRAKSI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MELAKSANAKAN DISKUSI DAN MUSYAWARAH INTERNAL DENGAN CATATAN SEBAGAI BERIKUT

- FRAKSI HANURA MEMANDANG PERLU AGAR PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARASEGERA MELAKUKAN UPAYA PERBAIKANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SERIUS KHUSUSNYA PERENCANAAN APBK YANG TUJUANNYA AGAR PEMERINTAH KABUPATEN BISA MENGIMPLENTASIKAN KETERPADUAN KOSENTRASI DAN SINGKRONISASI DIANTARANYA .
 - A. PERENCANAAN DENGAN PEMBANGUNAN
 - B. PERENCANAAN ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK TUMPANG TINDIH.
 - C. RELEVANSINYA PROGRAM ATAU KEGIATAN DENGAN PERMASALAHAN ATAU PELUANG YANG DI HADAPI.
- SEMUA PARAGRAF-PARAGRAF YANG KAMI SAMPAIKAN DI ATAS MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DAN MERUPAKAN KEMAUAN KITA BERSAMA YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA YANG RELEGIUS, BERBUDAYAMANDIRI, UNGGUL DAN SEJAHTERA,SEBAGAIMANA VISI MISI WAKIL BUPATI.
- SEBELUM KAMI MENGAKHIRI PENDAPAT AKHIR FRAKSI INI PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN SEDIKIT KEKELUHAN MASYARAKAT WILAYAH SEBERANG YANG SUDAH LAMA DIRASAKAN YAITU Pengerjaan JEMBATAN YANG MENGHUBUNGKAN VEDESI DENGAN DESA CINGKAM MEKhanggun ATAU JEMBATAN KECAMATAN BAMBEL DAN KECAMATAN LAWE ALAS DITAHUN 2019 PROGRESNYA 100 % SEHINGGA AKSES DI KEDUA KECAMATAN INI SEMAKIN MAJU DAN BERKEMBANG

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MENYATAKAN “DAPAT MENYETUJUI” RANCANGAN QANUN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2017 UNTUK DAPAT DI TETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 SETELAH DI EVALUASI OLEH GUBERNUR TENTUNYA.

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT INI KAMI SAMPAIKAN KAMI YAKIN BANYAK KELEMAHAN DAN BANYAK KEKURANGAN KAMI DALAM HAL PENYAMPAIAN INI, SEBAB SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA KESEMPURNAAN ITU SEMATA HANYA MILIKNYA ALLAH AZZA WAJJALLA YANG MAHA SEMPURNA DIATAS SEGALANYA.

AKHIRUKALAM WABILLAH I TAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAH I WABARAKATUH.

KUTACANE, 02 AGUSTUS 2018
FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MUHAMMAD DAUD	KETUA	_____	Dto_____
RAIDIN	WAKIL KETUA	_____	Dto_____
JAMUDIN SELIAN	ANGGOTA	_____	Dto_____
USMAN EFENDI	ANGGOTA	_____	Dto_____
JEMINAH	ANGGOTA	_____	Dto_____



3. FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN

ASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DAN REKAN – REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE - ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR MARI BERSAMA-SAMA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH.SWT ATAS SEGALA ANUGERAH YANG DI BERIKAN KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA INI DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017. KEMUDIAN YANG SE - AQIDAH DENGAN KAMI SELAWAT BERANGKAIKAN SALAM KIRANYA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN ALAM BAGINDA RASULULLAH.SAW BESERTA SEGENAP KELUARGA DAN PARA SAHABAT BELIAU YANG TELAH MEMBERIKAN SURI TAULADAN BAGI KITA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BERMASYARAKAT MAUPUN BERPEMERINTAHAN SECARA BAIK DAN AMANAH.

SAUDARA BUPATI DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.

UCAPAN TERIMA KASIH KAMI HATURKAN KEPADA SAUDARA PIMPINAN ATAS KESEMPATAN YANG DI BERIKAN KEPADA KAMI FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP LKPJ BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017. SEBELUM KAMI MULAI PENDAPAT AKHIR FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN INI TERLEBIH DAHULU KAMI MENGAJAK KITA SEMUA SEKALI LAGI MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG TELAH MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LHP DARI BPK RI PERWAKILAN ACEH. SEMOGA ACEH TENGGARA KEDEPAN MENJADI LEBIH BAIK LAGI.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN YANG VISIONER ADALAH DUA SISI MATA UANG YANG TAK DAPAT TERPISAHKAN. DIMANA KEPEMIMPINAN YANG BERWAWASAN MASA DEPAN AKAN DI TUNJUKKAN DENGAN KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA MASA DEPAN PULA. HAL INI DAPAT DI WUJUDKAN PADA PERENCANAAN YANG MATANG TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG PADA AKHIRNYA AKAN TERLAKSANA BILA DI TOPANG OLEH KEMAUAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MENERAPKANNYA SEHINGGA CITA-CITA PEMBANGUNAN DAERAH ITU MENJADI SEBUAH KENYATAAN.

HAL INILAH YANG DAPAT KITA PETIK DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN SELAMA INI. DENGAN SEGALA CORAK DAN DINAMIKANYA ADALAH MERUPAKAN SEBUAH PROSES TRANSISI KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN DALAM. MENGIMPLEMENTASIKAN DESENTRALISASI KEWENANGAN DAN RANAH KEHIDUPAN POLITIK YANG TELAH BERGERAK SECARA CEPAT, PARTISIPASI SERTA PERAN SOSIAL POLITIK LAPISAN MASYARAKAT SEMAKIN AKTIF DAN TINGGI DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN SEHARI-HARI.

DARI RANGKAIAN PENJELASAN DIATAS DAN SETELAH MENDENGAR DAN MEMBACA SECARA TEKSTUAL ATAS LKPJ BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 SERTA BERDASARKAN JAWABAN SAUDARA BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA YANG DI SAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA PADA SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA SEBENTAR TADI MAKA DENGAN INI KAMI FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN DPRK ACEH TENGGARA DENGAN INI MEYAMPAIKAN BEBERAPA TANGGAPAN SEBAGAI PENDAPAT AKHIR FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BIDANG PEMERINTAHAN

DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAERAH MAKA SEMUA UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN SUDAH SEPATUTNYA SALING MELAKUKAN KOORDINASI DAN EVALUASI SEHINGGA TERCIPTA KETERLIBATAN YANG PADU DAN SALING MELENGKAPI SATU SAMA LAINNYA, DIMANA KEBERHASILAN EKSEKUTIF DALAM MEREALISASIKAN SEMUA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENTU SANGAT BERKAITAN DENGAN MAKSIMALISASI KINERJA LEGISLATIF DALAM UPAYA MELAHIRKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ATAU PERATURAN YANG AKAN DI EKSEKUSI OLEH EKSEKUTIF DI LAPANGAN.

SELANJUTNYA BAHWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN JUGA HARUS SENANTIASA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI DALAMNYA MENGATUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL AGAR DAPAT MENGHASILKAN KUALITAS PELAYANAN YANG BERMUTU SEBAGAIMANA YANG KITA HARAPKAN BERSAMA. SEHINGGA BERBAGAI PERSOALAN YANG MUNCUL AKIBAT DARI KURANG MAKSIMALNYA PELAYANAN DAPAT KITA ATASI BERSAMA SECARA CEPAT DAN TEPAT.

2. PERTUMBUHAN EKONOMI

KAMI MELIHAT BAHWA TELAH TERJADI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG CUKUP BAGUS SELAMA PEMERINTAH LIMA TAHUN YANG LALU SEHINGGA PERWUJUDAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TENGGARA DARI TAHUN 2012-2017 DAPAT TERLAKSANA SECARA BAIK DAN MEMADAI. KEMUDIAN KAMI JUGA BERHARAP KEPADA PEMERINTAHAN YANG BARU MASA PERIODE 2017-2022 SAAT INI KAMI HARAPKAN AGAR TERUS MEMACU PERGERAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KITA LEBIH BAIK DAN MAJU LAGI KEDEPANNYA.

3. KINERJA DAERAH

KEDEPAN AGAR TERUS DI TINGKATKAN SINKRONISASI DAN LINTAS KOORDINASI ANTAR UNIT KERJA ATAU INSTANSI DI INTERNAL PEMERINTAHAN DENGAN PIHAK LEGISLATIF SEHINGGA TERJALIN



SINERGI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA PERLU TERUS DI LAKUKAN PENGUATAN DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH MELALUI BIMTEK, TRAINING, COACING YANG BERKELANJUTAN DAN TER EVALUASI SECARA BAIK DEMI TERSEDINYA TENAGA PENYELENGGARA PEMBANGUNAN DI SEMUA LINI SEHINGGA HASIL KERJA DARI UNIT KERJA PEMERINTAHAN TERSEBUT DAPAT KITA LIHAT DAN RASAKAN HASILNYA PADA SAATNYA NANTI.

4. TERHADAP PENYAMPAIN NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN(LKPJ) BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017 SERTA BERBAGAI PEMBAHASAN DALAM RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA INI KIRANYATELAH DAPAT MENJELASKAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH SELAMA INI BAIK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA MAKRO, TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ADALAH MERUPAKAN SEBUAHWUJUD DARI PENJABARAN RPJMKACEH TENGGARA TAHUN 2012 – 2017 YANG LALU YANG TERMUAT DI DALAMNYA VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SIDANG DAN REKAN – REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

5. SELANJUTNYA KAMI FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN SEKALI LAGI PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN UCAPAN TERIMA KASIH SECARA TULUS DAN IKHLAS ATAS BERAGAM KOMITMEN DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA ATAS BERBAGAI AGENDA PENTING YANG TELAH DI LAKSANAKAN SELAMA PEMERINTAHAN TAHUN 2017 YANG LALU. SERTA BERAGAM HAL YANG TELAH DI SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA INI.

DARI BERAGAM PENYAMPAIAN TERSEBUT DIATAS MAKA TIBALAH KITA PADA SEBUAH KESIMPULAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN ATAS LKPJ BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DAN SETELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERTIMBANGAN, MEMPERHATIKAN ATAS SIKAP DAN PANDANGAN ANGGOTA DEWAN SERTA MEMPELAJARI KONFIGURASI KEBIJAKAN POLITIK SECARA BERSAMA-SAMA SERTA BERDASARKAN HASIL RAPAT INTERNAL FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN MAKA FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN MEMUTUSKAN BAHWA:

“MENYETUJUI RANCANGAN KEPUTUSAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017 DISAHKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2017 ”

DENGAN CATATAN AGAR SEMUA HARAPAN DAN MASUKAN ANGGOTA DEWAN PADA PARIPURNA ISTIMEWA INI DAPAT DI SELESAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAUDARA HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI MULIAKAN

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN INI KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI ATAS KEKURANGAN DAN KE KHILAFAN KAMI MOHON MAAF SEBESAR – BESARNYA DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN PESERTA SIDANG SEKALIAN.

WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB

KUTACANE, 12 JULI 2018
DPRK ACEH TENGGARA

FRAKSI SEPAKAT PERUBAHAN:

7. M.SOPIAN DESKY.S.Ag (KETUA) 1.....Dto.....
8. Ir.BUDIMANSYAH(WAKIL KETUA) 2.....Dto.....
9. T.DEDY FAISAL.ST (SEKRETARIS)3.....Dto.....
10. KAMIRUN MUNTHE (ANGGOTA) 4.....Dto.....
11. NURLELATI (ANGGOTA) 5.....Dto.....
12. SOFIAN EFFENDI (ANGGOTA) 6.....Dto..... -----

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

ASSALAMU'ALAIKUM. WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG TERHORMAT SAUDARA PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG TERHORMAT PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN



PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, IZINKAN KAMI DARI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERI KITA LIMPAPAN NIKMAT DAN KURUNIA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE II TAHUN 2018, TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA, BAGI YANG SEAKIDAH DENGAN KAMI, SELAWAT BERIRINGKAN SALAM MARI SAMA-SAMA KITA SANJUNGGAN KEHARIBAAN JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH MEREFORMASI UMMAT DARI ALAM KEBODOHAN MENUJU ALAM YANG PENUH DENGAN ILMU PENGETAHUAN SEPERTI YANG KITA RASAKAN PADA SAAT INI. .

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHOMAT

- ❖ MENGAWALI PENDAPAT AKHIR FRAKSI INI PERTAMA-TAMA KAMI SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG TELAH MENYUSUN DAN MENYELESAIKAN SALAH SATU TUGASNYA SELAKU KEPALA DAERAH YAKNI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017, YANG SAMA-SAMA KITA KETAHUI PENCAPAIANNYA CUKUP POSITIF BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017, KIRANYA DAPAT DI TINGKATKAN DAN DIPERTAHANKAN ATAS CAPAIAN PRESTASI WAJAR TANPA PENGECUALIAN TERSEBUT.
- ❖ PEMBAHASAN DAN PENILAIAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEPALA DAERAH INI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN KEPALA DAERAH DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.
- ❖ BAHWA SEBAGAIMANA LAZIM DILAKUKAN DAN SESUAI PEDOMAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, MAKA FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA 2017 INI SECARA UMUM MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP INDIKATOR DAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DIMANA HAL TERSEBUT MENGACU KEPADA REALISASI ANGGARAN APBK 2017 DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- ❖ DARI JAWABAN SAUDARA BUPATI TADI, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KESUNGGUHAN MERESPON SETIAP SARAN PENDAPAT DARI SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG DIKEMAS DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, NAMUN DEMIKIAN, TINDAK LANJUT DARI RESPON TERSEBUT JAUH LEBIH PENTING DAN KAMI HARAPKAN DITAHUN YANG AKAN DATANG AGAR DAPAT KONSISTEN MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN YANG KITA HARAPKAN.
- ❖ BERKAITAN DENGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2017 YANG SEBENTAR LAGI AKAN KITA SEPAKATI BERSAMA, BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN PADA PENDAPAT AKHIR FRAKSI YAITU SEBAGAI BERIKUT :
 5. PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DALAM HAL MINIMNYA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, SAUDARA BUPATI TELAH MENJAWAB PANDANGAN UMUM KAMI DENGAN BIJAK, TERKAIT DENGAN SANKSI KEPADA SKPK APABILA KINERJA APARATUR YANG MEMBIDANGI DALAM HAL MENANGANI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN JUGA MENGAPRESIASI KOMITMEN SAUDARA BUPATI DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR, MAKA DENGAN DEMIKIAN, FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENINGINKAN DALAM TAHUN BERIKUTNYA AGAR CAPAIAN PAD DAPAT TEREALISASI SECARA MAKSIMAL.
 6. BELANJA DAERAH

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH, BAHWA BELANJA DAERAH TERBAGI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TAK TERDUGA SERTA BELANJA TRANSFER, YANG DIRENCANAKAN Rp. 1. 543. 106. 761. 941 (SATU TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIYAR SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH), DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp. 1. 343. 790. 069. 489 (SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU 87,08 PERSEN, DENGAN ANGKA TERSEBUT DAPAT KITA LIHAT SECARA UMUM BAHWA REALISASI CAPAIAN BELANJA DAERAH HAMPIR SESUAI DENGAN TARGET, MAKA FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT MENINGINKAN KONSISTENSI AKUNTABILITI PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN APBK SEHINGGA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DIHADAPAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA.
 7. REALISASI PEMBIAYAAN

REALISASI PEMBIAYAAN TERDIRI DARI REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH, REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TEREALISASI 76,99 PERSEN DARI DIRENCANAKAN, SEHINGGA MENGHASILKAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2017 SEBESAR SEMBILAN PULUH TIGA MILIYAR TUJUH RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS TIGA RIBU TIGA PULUH TUJUH RUPIAH, HAL INI MERUPAKAN DIKARNAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG KURANG BAIK, DENGAN DEMIKIAN PERLUNYA KECERMATAN DAN AKURASI DALAM PERENCANAAN KEDEPANNYA.
 8. TERKAIT DENGAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PDAM TIRTA AGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPASILITASI PDAM SEBAGAI SALAH SATU BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERTUJUAN AGAR TIDAK TERKENDALA DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS BUMD TERSEBUT, NAMUN KAMI MASIH MENDENGAR PELAYANAN BUMD TERSEBUT MASIH KURANG PRIMA, MOHON KIRANYA DIPERHATIKAN KINERJA BUMD TERSEBUT GUNA MASYARAKAT MENDAPATKAN

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT

- ❖ APA YANG KAMI SAMPAIKAN DIATAS ADALAH BENTUK KOMITMEN DAN KECINTAAN KAMI DARI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT TERHADAP KEMAJUAN BUMI SERAMBI MEKAH SEPAKAT SEGENEP KABUPATEN ACEH TENGGARA, MAKA BERDASARKAN INDIKATOR LHP BPK, DENGAN INI FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT UNTUK MENYETUJUI RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018

PESERTA PARI PURNA YANG KAMI MULIAKAN....

- ❖ DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2017.
- ❖ AKHIRNYA KEPADA TUHAN KAMI MEMOHON AMPUN KEPADA SEGENAP MASYARAKAT KAMI MOHON MAAF, TERIMAKASIH
WASSALAMU'ALAIKUM WR WBR.

KUTACANE, 2 AGUSTUS 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA
FRAKSI PERJUANGAN DEMOKRAT

KETUA : H. JOHANUDDIN, DESKY (.....Dto.....)
WAKIL KETUA : BUSTAMI ACEH (.....Dto.....)
SEKRETARIS : TIMBUL H. SAMOSIR (.....Dto.....)
WKL SEKRETARIS : SUPIAN SEKEDANG (.....Dto.....)
ANGGOTA : NAZARUDIN (.....Dto.....) -----

PEMBACAAN KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA FRAKSI-FRAKSI TENTANG RANCANGAN QANUN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017. (KONSEP TERLAMPIR)

PEMBACAAN KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG RANCANGAN
QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017. (Konsep
Terlampir) -----

PIMPINAN RAPAT MELONTARKAN PERTANYAAN KEPADA ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA ----- APAKAH
SAUDARA-SAUDARI SELURUH PESERTA RAPAT PARI PURNA YANG TERHORMAT INI ----- SETUJU !!! -----ATAS
KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI ACEH TENGGARA DENGAN DPRK ACEH TENGGARA -----
TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2017 DAPAT KITA SETUJUI ----- MAKA ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA MENYATAKAN -----
"SETUJU" ----- PALU 1X -----

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRK ACEH
TENGGARA (Berita Acara Terlampir) -----

DENGAN TELAH DISERAHKANNYA BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA TADI KEPADA SAUDARA BUPATI -----
MAKA BERAKHIRLAH ACARA KITA TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK
ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 ----- MAKA RAPAT PARI PURNA INI KAMI SKOR ----- SAMPAI HASIL
EVALUASI DARI GUBERNUR ACEH ----- (PALU 3X) -----

KUTACANE, 02 AGUSTUS 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA
KETUA,

IRWANDI DESKY, SP